



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025–2029

DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, DESA
DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	 5
BAB I. PENDAHULUAN	 6
1.1 Latar Belakang	 6
1.2 Landasaan Hukum	 7
1.3 Maksud dan Tujuan	 9
1.4 Sistematika Penulisan	 9
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DPMDT	 11
PROV.LAMPUNG	
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	 11
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	 11
Dinas PMDT	
2.1.2. Sumber Daya Dinas PMDT Provinsi	 25
Lampung	
2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas	 28
PMDT Provinsi Lampung	
1. Program dan Kegiatan Periode Lalu	 28
2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan	 30
Minimal / Pencapaian Program dan	
Kegiatan	
2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas	 58
PMDT Provinsi Lampung	
2.1.5. Mitra Dinas PMDT Provinsi Lampung	 58
2.1.6. Dukungan BUMD Dalam Pencapaian	 59
Kinerja Dinas PMDT	
2.1.7. Kerjasama Derah Yang Menjadi Tanggung	 59
Jawab Dinas PMDT	
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis	 59
2.2.1. Permasalahan	 59
2.2.2. Isu Strategis	 60

BAB III. TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN	 64
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas PMDT	 64
2025-2029	
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas	 65
PMDT 2025-2029	
BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN SUBKEGIATAN	 68
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN	
BIDANG URUSAN	
4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas	 68
PMDT	
4.2 Dukungan SubKegiatan Renstra Dinas PMDT	 96
Pada RPJMN 2025-2029	
4.3 Dukungan Program, Kegiatan dan Sub	 103
Kegiatan Perangkat Daerah pada Program	
Unggulan Daerah dan Program Pendukung	
Tematik Pembangunan	
4.4 Inovasi Dari Dinas PMDT Provinsi Lampung	 105
Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi	
Untuk Mencapai Visi Misi Gubernur dan Wakil	
Gubernur	
4.5 Target Capaian Keberhasilan Renstra yang	 110
Tertuang Dalam IKU Dinas PMDT	
4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan	 113
Pemerintahan Dalam IKK Dinas PMDT	
BAB V. PENUTUP	 115
LAMPIRAN	
LAMPIRAN 1. CSF	 116
I AMPIRAN 2 POHON KINERIA	110

3

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Sarana dan Prasarana Dinas PMDT Provinsi Lampung	 24
Tabel 2.	Jumlah Pegawai Dinas PMDT Provinsi Lampung	26
Tabel 3.	Jumlah SDM Dinas PMDT Provinsi Lampung berdasarkan Eselonsasi	 27
Tabel 4.	Pemenang Juara Lomba Desa Tahun 2020-2024	 30
Tabel 5.	Pemenang Juara Lomba Kelurahan Tahun 2020-2024	 31
Tabel 6.	Perkembangan Alokasi dan Anggaran Dinas PMDT	 32
Tabel 7.	Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PMDT 2020-2024	 33
Tabel 8.	Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas PMDT	 44
Tabel 9.	Teknik Mengumpulkan Isu Strategis Daerah	 62
Tabel 10	. Tujuan, Sasaran Renstra Dinas PMDT	 65
Tabel 11	. Strategi, Arah Kebijakan Dinas PMDT	 66
Tabel 12	. Penahapan Renstra Dinas PMDT	 67
	Prov.Lampung	
	. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Renstra Dinas PMDT Provinsi Lampung	 71
Tabel 14.	Rencana Pendanaan pada Renstra Dinas PMDT	 83
Tabel 15	. SubKegiatan Program Prioritas pada Renstra Dinas PMDT	 94
Tabel 16	. SubKegiatan Mendukung KPU pada Renstra Dinas PMDT	 96
Tabel 17	. Intervensi Pada Arah Pembangunan Wilayah Provinsi Lampung Dalam RANHIR RPJMN 2025-2029	 98
Tabel 18	. Dukungan Program, Kegiatan pada Program Unggulan	 102
Tabel 19	. Dukungan Program, Kegiatan pada Tematik Pembangunan	 103
Tabel 20	. Dukungan Program, Kegiatan pada Program Unggulan	104
	. Inovasi Dinas PMDT	 107
Tabel 22	. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PMDT	 111
Tabel 23	. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Defnisi Operasional Dinas PMDT	 112

Tabel 24. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas PMDT		114
DAFTAR	GAMBAR	
Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas PMDT		23
Gambar 2. Inovasi Dinas PMDT Prov.Lampung		69
Gambar 3. Skema Program Dinas PMD Prov.Lampung		106

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami ucapkan atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas PMDT Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan.

Penyusunan Renstra Dinas PMDT Provinsi Lampung tahun 2025-2029 disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD serta menyesuaikan dengan Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019.

Rencana Strategis (Renstra) ini berisikan rencana program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2025 sampai dengan 2029 yang akan dijadikan pedoman bagi seluruh pegawai Dinas PMDT Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugasnya dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Semoga Rencana Strategis periode Tahun 2025-2029 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Dinas PMDT Provinsi Lampung.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung

SAIPUL, S.Sos, M.IP

Pembina Utama Madya NIP.19710726 199902 1 001

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Organisasi perangkat daerah memiliki tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan serta sub kegiatan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Gubernur serta Wakil Gubernur hingga menjadi arah pembangunan utama bagi organisasi tersebut. Berdasarkan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang mewajibkan organisasi perangkat daerah wajib melakukan penyusunan renstra.

Selanjutnya Permendagri No. 54 Tahun 2010 mengatur tentang kewajiban daerah dalam penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra OPD, renja OPD, serta RKPD. Adapun prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi:

- 1. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional
- dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing
- mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah
- serta dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Oleh karenanya sinkronisasi antara RPJMD dengan RPJMN, kemudian sinkronisasi antara renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung dengan RPJMD Provinsi Lampung, sangat penting untuk menjamin keselarasan rencana pembangunan di level pusat dan daerah.

Selain hal tersebut, kondisi ekonomi nasional dan global juga turut mempengaruhi penataan dan pemetaan kebutuhan anggaran hingga dipandang perlu untuk melakukan analisis prioritas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah.

Dalam rangka keselarasan tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung telah berupaya melakukan pemetaan pada seluruh kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 dan selanjutnya disempurnakan oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3798 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri (INMENDAGRI) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.2. Landasan Hukum

Adapun dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
- 6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 7) Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen
 Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13) Perpres No 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19)
- 14) Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah;
- 15) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Desa;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2007 tentang
 Pedoman Administrasi Kelurahan;
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan;
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;
- 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;
- 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
- 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
- 30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
- 31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
- 32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tentang Tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 33) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- 34) Permendagri 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 35) Permendagri 77 tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 36) Kepmendagri 900-1-2850 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Prencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 37) Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 061/2911/SJ/2016 Tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 38) Instruksi Menteri Dalam Negeri (INMENDAGRI) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 39) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- 40) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2023-2043;
- 41) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2025-2045 Provinsi Lampung;
- 42) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung tahun 2025-2029
- 43) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

- Fungsi Serta Tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi provinsi Lampung.
- 44) Rencana Strategis Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2020-2024;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi (DPMDT) Provinsi Lampung periode 2025-2029 merupakan wujud upaya penyelarasan dan pemetaan nomenklatur dan kodefikasi baru secara nasional berdasarkan Permendagri Nomor 90 tahun 2019. Selanjutnya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung juga mengacu pada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra ini adalah :

- a. Menjabarkan gambaran tentang kondisi pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung dengan menyesuaikan nomenklatur secara nasional.
- b. Memudahkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi dalam mencapai tujuan organisasi dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur serta mampu menuangkannya ke dalam dokumen renja kerja tahunan.
- c. Memudahkan seluruh jajaran Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi untuk memahami dan menilai arah kebijakan dalam program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.
- d. Mendukung Program Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan secara terukur dalam jangka waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Selanjutnya Rencana Strategis Dinas PMDT Provinsi Lampung disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (INMENDAGRI) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I **Pendahuluan**, yang berisi Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.
- BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi
 Provinsi Lampung, yang berisi Gambaran Pelayanan
 Perangkat Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis.
- BAB III **Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan** yang berisi Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Strategi dan Arah Kebijakan.
- Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja
 Penyelenggaraan Bidang Urusan yang berisi Program,
 Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Renstra Dinas PMDT
 Provinsi Lampung, Dukungan Sub Kegiatan Renstra Dinas
 PMDT pada RPJMN 2025-2029, Inovasi dari Perangkat
 Daerah Dalam Pelaksanaan Tugas Fungsi Untuk Mencapai
 Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur, Target Keberhasilan
 Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra, Target Kinerja
 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
- BAB V **Penutup** yang berisi kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

a. Tugas DPMDT Provinsi Lampung

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi provinsi Lampung, Dinas PMDT memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

b. Fungsi DPMDT Provinsi Lampung

Terkait dengan tugas pokoknya tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis pengelolaan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi;
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Transmigrasi;

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi;
- 5. Pengelolaan administratif;

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung memiliki Tugas Pokok dan Fungsi serta susunan organisasi sebagai berikut:

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, Desa dan Ketransmigrasian, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang di berikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang di tetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan bidang pemberdayaan masyarakat, Desa dan Ketransmigrasian;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, Desa dan Ketransmigrasian;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat, Desa dan Ketransmigrasian;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Gubernur di Bidang pemberdayaan masyarakat, Desa dan Ketransmigrasian; dan
 - e. pengelolaan administratif.

c. Struktur Organisasi DPMDT Provinsi Lampung

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- c. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan,
- d. Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat,
- e. Bidang Pengembangan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,
- f. Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna,
- g. Bidang Ketransmigrasian,
- h. Kelompok jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- 3) Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- 4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- 5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Kepala

- 1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ketransmigrasian dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan rumah tangga Provinsi (desentralisasi) dalam kewenangannya, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai kebijakan yang di tetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1), maka Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar/ pedoman;
 - b. Pembinaan, pengendalian, pengawasan serta koordinasi;
 dan
 - c. Pelaksanaan administrasi Dinas.

Sekretariat

(1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi perencanaan, ketatausahaan, dokumentasi dan informasi,

- kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan perencanaan dan progam pengumpulan dan analisis data, evaluasi, monitoring dan pelaporan;
 - b. Penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Penyusunan anggaran dan pengelolaan urusan keuangan;
 - d. Pengelolaan perlengkapan dan urusan rumah tangga;
 - e. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian; dan
 - f. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi.
- (4) Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
- (5) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, keprotokolan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan dan menyiapkan kegiatan bahan surat menyurat;
- b. Mengatur penyelesaian surat-surat dinas, pengamanan naskah dinas yang sifatnya harus dirahasiakan;

- c. Mengatur penyediaan alat tulis kantor, penggunaan stempel dinas, operator telepon, faximile dan komputer, pengaturan dan pemeliharaan kendaraan dinas operasional;
- d. Menyelenggarakan administrasi barang inventaris dan perlengkapan serta pengamanan barang-barang milik pemerintah;
- e. Menyiapkan dan melaksanakan pemeliharaan gedung kantor, pemeliharaan dan pengadaan alat kantor;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan formasi dan mutasi pegawai, pendidikan serta pelatihan pegawai;
- g. Melaksanakan pengelolaan tatau saha kepegawaian;
- h. Menyelenggarakan kegiatan rumah tangga, tata usaha Pimpinan dan keprotokolan;
- i. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan.

Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan penyusunan rencana pelaksanaan anggaran belanja;
- b. Penatausahaan keuangan berupa penerimaan, penyimpanan, penyetoran, pembayaran, penyerahan dan pertanggungjawaban pengeluaran;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi atas surat pertanggungjawaban pengeluaran;
- d. Melaksanakan akuntansi;
- e. Mengumpulkan/ mengolah data keuangan untuk bahan penyusunan laporan keuangan;
- f. Mencatat dan mengklarifikasi serta menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pengawas fungsional;
- g. Menyiapkan bahan usulan pengangkatan dan pemberhentian calon bendahara dan penanggungjawab/ kuasa pengguna anggaran;

- h. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan dan perbendaharaan;
- i. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

I. Bidang Desa dan Kelurahan

- (1) Bidang Desa dan Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi di bidang Desa dan Kelurahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Untuk menyelenggarankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan pedoman fasilitasi administrasi desa dan pengembangan desa/ kelurahan; dan
 - b. Perumusan pedoman fasilitasi pengelolaan keuangan desa, aset desa dan pengembangan kapasitas desa.
 - c. Perumusan pedoman pengembangan dan peningkatan kapasitas.
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Bidang Desa dan Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi.

II. Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat

- 1) Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi dibidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1), Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan pedoman fasilitasi pengembangan potensi dan kelembagaan masyarakat;
- b. Perumusan pedoman fasilitasi pengembangan sumber daya masyarakat dan partisipasi masyarakat.
- 3) Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi.

III. Bidang Usaha Pengembangan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

- (1). Bidang Usaha Pengembangan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian Dinas Pemberdayaan tugas Masyarakat, Desa dan Transmigrasi dibidang Usaha Pengembangan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Desat berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2). Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1), Bidang Usaha Pengembangan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. perumusan pedoman fasilitasi dan kebijakan usaha ekonomi masyarakat;
 - b. perumusan pedoman fasilitasi dan kebijakan usaha ekonomi perdesaan dan masyarakat tertinggal;
 - c. perumusan pedoman fasilitasi dan kebijakan kerjasama, kemitraan dan Kawasan Perdesaan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan
- (3) Bidang Usaha Pengembangan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi.

IV.Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

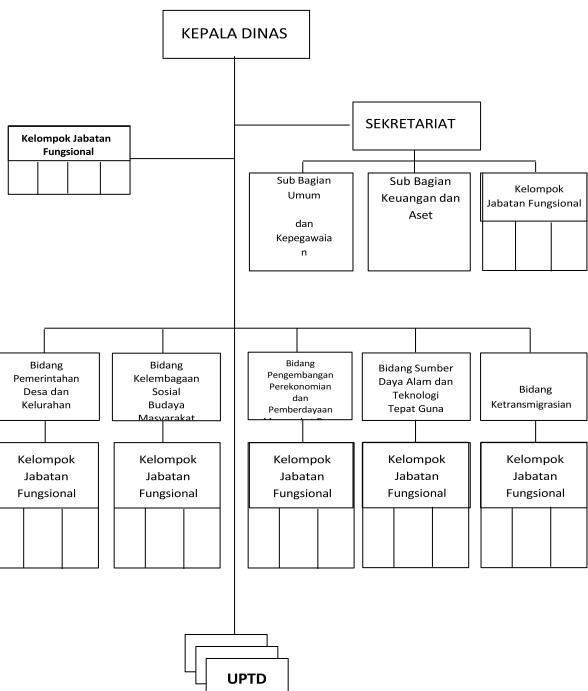
- (1) Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi dibidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Perumusan pedoman pendayagunaan sumber daya alam perdesaan; dan
 - b. Perumusan pedoman pendayagunaan teknologi tepat guna perdesaan.
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (1) Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi.

V. Bidang Ketransmigrasian

- (1) Bidang ketransmigrasian mempunyai tugas merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan serta standarisasi teknis di Bidang Ketransmigrasian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Bidang ketransmigrasian mempunyai fungsi :
 - Perumusan kebijakan dibidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan dan Pengembangan permukiman transmigrasi, penataan persebaran penduduk, Pengembangan Usaha, Pengembangan Sosial Budaya; dan Pelayanan pertanahan transmigrasi;
 - 2. pelaksanaan kebijakan di pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan

- dan Pengembangan permukiman transmigrasi, penataan persebaran penduduk, Pengembangan Usaha, Pengembangan Sosial Budaya; dan Pelayanan pertanahan transmigrasi;
- penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan dan Pengembangan permukiman transmigrasi, penataan persebaran penduduk, Pengembangan Usaha, Pengembangan Sosial Budaya; dan Pelayanan pertanahan transmigrasi;
- 4. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan dan Pengembangan permukiman transmigrasi, penataan persebaran penduduk, Pengembangan Usaha, Pengembangan Sosial Budaya; dan Pelayanan pertanahan transmigrasi;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Ketransmigrasian;
- 6. Pelaksanaan administrasi Bidang Transmigrasi; dan
- 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Bidang Ketransmigrasian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung, ditetapkan bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi yaitu;



Gambar 1. Struktur Organisasi DPMDT Provinsi Lampung

2.1.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

Menurut Fikri, Muhammad (2021) Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya terdiri dari sumber daya fisik dan sumber daya non-fisik (intangible). Sumber daya ada yang dapat berubah, baik menjadi semakin besar maupun hilang, dan ada pula sumber daya yang kekal (selalu tetap). Selain itu, dikenal pula istilah sumber daya yang dapat pulih atau terbarukan (renewable resources) dan sumber daya tak terbarukan (non-renewable resources).

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa sumber daya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung terdiri dari sumber daya fisik berupa kesediaan sarana dan prasarana yang dimiliki serta sumberdaya non fisik yang berupa SDM dari tiap individu dalam organisasi perangkat daerah. Secara keseluruhan sumber daya tersebut digunakan secara maksimal demi pencapaian kinerja dalam mewujudkan visi serta misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung.

Adapun sumberdaya Dinas PMDT Provinsi Lampung dapat digambarkan pada beberapa tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Sarana dan Prasarana Dinas PMDT Provinsi Lampung

No.	Nama/Jenis Barang	Jumlah
1.	Gedung Kantor	1 unit
2.	Kendaraan roda 2	25 unit
3.	Kendaraan roda 4	5 unit
4.	Komputer	30 unit
5.	Komputer jaringan	-
6.	AC Split	20 unit
7.	Lemari arsip	30 buah
8.	Filing cabinet	20 buah
9.	Brankas	-
10.	Kursi sandaran pendek	40 buah
11.	Lemari kayu	2 unit

12.	Rak kayu	3 unit
13.	Meja rapat	5 buah
14.	Meja kerja ess II	1 buah
15.	Meja kerja ess III	6 buah
16.	Meja kerja ess IV	2 buah
17.	Kursi kerja ess II	1 buah
18.	Kursi kerja ess III	6 buah
19.	Kursi kerja ess IV	2 buah
20.	Kursi rapat	35 buah
21.	Kursi putar sandaran tinggi	12 buah
22.	Kursi lipat stainless	35 buah
23.	Meja ½ biro kayu	51 buah
24.	Kursi tamu/size	4 unit
25.	Buffet kaca	-
26.	Mesin tik manual	1 buah
27.	Faximile	-
28.	LCD	1 unit
29.	OHP	-
30.	Intercom unit	10 buah
31.	Sound system	2 unit
32.	Computer note book	20 unit
33.	Handycam	1 unit
34.	Kamera	1 unit
35.	TV	4 unit
36.	Vacum cleaner	-
37.	Wireless	1 buah
38.	Mesin potong rumput	1 buah
39.	Alat pemadam kebakaran	1 buah
40.	Gordyn	5 paket
41.	Kanopy/awning	3 unit

Selanjutnya Dinas PMDT Provinsi Lampung hingga tahun 2022 ini memiliki SDM berjumlah 93 orang yang terdiri dari pegawai negeri sipil 79 orang, PTHL 14 orang dengan kualifikasi pendidikan, pangkat/golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional sebagaimana terdapat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. Jumlah Pegawai Dinas PMDT Provinsi Lampung

Jumlah	Kualifikasi	Pangkat/G	Juml	ahPejabat
Pegawai	Pendidikan	ol	Struktural	Fungsional
1	2	3	4	5
PNS : 53	S3 :	IV/d : 1		
CPNS: 12	S2 : 24	IV/c : 1		Fungsional = 17
PPPK : 16	S1 : 34	IV/b : 5	Ess III = 6	
	D4 : 1	IV/a : 12	Ess II = 1	
L : 43	D3 : 6	III/d : 12	Ess IV = 1	
P : 38	D2 : -	III/c : 6		
	D1 : -	III/b : 5		
	SLTA : 15	III/a : 20		
	SLTP : -	II/d : 1		
	SD : 1	II/c : 2		
		II/b : 0		
		II/a : 1		

Rekapitulasi nomenklatur dan jabatan/eselon perangkat daerah Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung menegaskan bahwa jumlah sumber daya Dinas PMDT Provinsi Lampung berdasarkan eselon dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 3. Jumlah SDM Dinas PMDT Provinsi Lampung Berdasarkan Eselonisasi

	PERANGKAT DPMDT						IV	JML
		IB	IIA	IIB	IIIA	IIIB	Α	
1	Sekretariat	-	1	-	1	-	-	2
	Sub Bagian Umum dan						1	1
	Kepegawaian	_	_	-	_	-	'	'
	Sub Bagian Keuangan	-	-	-	-	-	1	1
2	Bidang Desa dan Kelurahan	-	-	-	1	-	-	1
3	Bidang Kelembagaan Sosial	_	_	_	1	_	_	1
	Budaya, Masyarakat				'			'
4	Bidang Usaha Pengembangan	_	_	_	1	_	_	1
	Perekonomian Masyarakat	_	_	_	'	-	_	'
5	5 Bidang Sumber Daya Alam dan		_		1	_	_	1
	Teknologi Tepat Guna	_	_	<u>-</u>		_	_	'
6	Bidang Transmigrasi	-	-	-	1	-	-	1
JUN	ILAH ESELON	-	1	-	6	-	2	9

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung

Dalam kurun waktu 2019-2024 DPMDT Provinsi Lampung telah menyelenggarakan pelayanan di bidang Pemberdayaan Masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi untuk pencapaian dan perwujudan pembangunan yang berkualitas dan berhasil guna dimana evaluasi kinerja capaian-capaian Program Prioritas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Daerah Provinsi Lampung.

1. Program dan Kegiatan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Urusan Pilihan Bidang transmigrasi di Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja utama Pemerintah Provinsi Lampung yang ke-10 "Persentase

Angka Kemiskinan" yang tertuang dalam pelaksanaan kegiatannya diprioritaskan pada program :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- 2. Program Peningkatan Kerjasama Desa
- 3. Program Administrasi Pemerintahan Desa
- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
- 5. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Pada Tahun Anggaran 2019-2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung melaksanakan program dan kegiatan prioritas antara lain:

- 1. Penilaian Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi;
- 2. Pelaksanaan BBGRM tingkat Provinsi dan Nasional
- 3. Pengentasan Stunting Desa
- 4. Pelaksanakan TTG Nasional
- 5. Pembinaan dan Kerjasama BUMDes/ BUMDesma.

Pada Tahun Anggaran 2019-2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung memiliki 5 Program dengan 11 Kegiatan dan 40 Sub Kegiatan. Adapun keseluruhan kegiatan sebagai berikut:

- 1. Fasilitasi Kerja Sama Antardesa yang menjadi Kewenangan Provinsi
- Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- 4. Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 5. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 6. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 7. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 8. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 9. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 10. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda
- 11. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda

2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal/Pencapaian Program dan Kegiatan

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal/Pencapaian Program dan Kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa di Provinsi Lampung kurun waktu 2019-2024 dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung antara lain sebagai berikut:

a. Kegiatan Penilaian Perlombaan Desa/Kelurahan Kegiatan bertujuan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan keberhasilan pembangunan desa dan kelurahan, perlu upaya penguatan kelembagaan, peningkatan motivasi dan swadaya gotong royong masyarakat di desa dan kelurahan, untuk menilai keberhasilan pembangunan desa dan kelurahan perlu dilakukan perlombaan desa dan kelurahan secara terarah terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan yang diikuti 15 Kabupaten/Kota setiap tahun, Adapun pemenang Juara I Lomba Desa/Kelurahan Tahun 2019 s/d 2024 sebagai berikut:

Tabel 4. Pemenang Juara Lomba Desa Tahun 2019 – 2024

No	Tahun	Desa /Kecamatan	Kabupaten
1.	2019	Wates/Way Ratai	Pesawaran
2.	2020	-	-
3.	2021	Pulung Kencana/Tulang Bawang Tengah	Tulang Bawang Tengah
4.	2022	Kampung Bandar Agung / Terusan Nunyai	Lampung Tengah
5.	2023	Kampung Pujokerto/ Trimulyo	Lampung Tengah
6.	2024	Desa Bumi Daya/ Palas	Lampung Selatan

Tabel 5. Pemenang Juara Lomba Kelurahan Tahun 2019-2024

No	Tahun	Kelurahan/ Kecamatan	Kab/Kota
1	2019	Purwosari/Metro Utara	Metro
2	2020	-	-
3	2021	Rejo Mulyo/Metro Selatan	Metro
4	2022	Tejo Agung/Metro Timur	Metro
5	2023	Yosorejo/ Metro Timur	Metro
6	2024	Yosodadi/ Metro Timur	Metro

- b. Kegiatan Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna Nasional (TTG) bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan masyarakat di bidang teknologi perdesaan dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi dan kualitas lingkungan pedesaan, hal ini diupayakan melalui kegiatan pengembangan dan penerapan teknologi yang dapat memacu tumbuhnya agroindustri di pedesaan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan seleksi tingkat provinsi dan dilanjutkan dengan keikutsertaan Provinsi Lampung pada Lomba TTG Nasional.
- c. Kegiatan Pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan BBRGM dalam rangka pembangunan partisipatif bertujuan untuk mengetahui keterkaitan dinas/instansi yang turut berperan dalam melaksanakan Permendagri No. 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM). Untuk mengetahui kinerja masyarakat dalam melakukan gotong royong masyarakat di masing-masing desa dalam kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pembangunan di tingkat desa/kelurahan. Adapun lokasi yang dijadikan tempat kegiatan BBGRM tingkat Provinsi adalah :

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Selama periode tahun 2019-2024, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung memiliki daya serap anggaran diatas 90%. Anggaran ini sepenuhnya digunakan untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Secara lebih rinci, disajikan tabel alokasi dan realisasi anggaran DPMDT Provinsi Lampung tahun 2019-2024

Tabel 6. Perkembangan Alokasi dan Anggaran DPMDT Lampung

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persent
			ase
1	2	3	4
2019	Rp. 7.524.903.500,00	Rp. 7.037.325.114,00	93,52
2020	Rp. 12.230.206.518,00	Rp. 11.805.647.934,00	96,53
2021	Rp. 22.982.125.941,70	Rp. 21.681.714.723,00	94,34
2022	Rp.18.643.811.396,00	Rp.18.173.987.348,82	97,48
2023	Rp. 35.505.644.508,95	Rp.34.955.307.019,06	98,45
2024	Rp.18.702.250.593	Rp.18.000.916.195,76	96,25

Selanjutnya pencapaian Kinerja dan Anggaran serta Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung, dituangkan dalam tabel T-C.23 dan T-C.24 sebagai berikut:

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung memiliki urusan **Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Urusan Pilihan Transmigrasi** serta memiliki 5 kinerja yang telah terlaksana dan tercapai secara maksimal pada periode yang lalu sebagaimana tertuang di dalam dokumen Renstra 2019-2024 selanjutnya tergambar pada tabel T-C.23.

		Т	abel.7. T-0	C.23. Tal	oel Penca	oaian Kine	erja Pelaya	anan Dinas	s Pembero	dayaan Ma	syarakat,	Desa dan	Transmigras	si			
							Provinsi	Lampung	(2020-202	24)							
No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target F	Renstra F	tra Perangkat Daerah Tahun ke-Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-								
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Menggunakan Smart Village (Indikator Tujuan Renstra Perubahan 2019- 2024)	Persen	0.16	2.22	24.69	31.86	85.76	5.33	29.77	49.48	65.59	99.95	3,331.25	1,340.99	200.41	205.87	116.55
2	Persentase Peningkatan Jumlah Desa Menggunakan Sistem Smart Village (Indikator Sasaran IKU 2019-2024)	Persen	0.16	2.22	24.69	31.86	85.76	5.33	29.77	49.48	65.59	99.95	3,331.25	1,340.99	200.41	205.87	116.55
3	Persentase desa yang menerapkan sistem administrasi pemerintahan desa berbasis teknologi informasi	Persen	20.95	P	Perubahan Nomenklatur			20.95	5 Perubahan Nomenklatur			100%	Perubahan Nomenklatur				
4	Jumlah desa / kelurahan terbaik	desa dan kelurahan	12	P	erubahan	Nomenkla	atur	12	Perubahan Nomenklatur			100%	Perubahan Nomenklatur				
5	Jumlah Kab/Kota yang dimonitoring dan dinilai	desa	52	P	erubahan	Nomenkla	atur	52	Perubahan Nomenklatur			100%	Perubahan Nomenklatur				
6	Jumlah peserta yang dilatih	desa/ desa mandiri	400	P	erubahan	Nomenkla	atur	400	Perubahan Nomenklatur			100%	Perubahan Nomenklatur				
7	Jumlah desa berbasis digital	desa	30	P	erubahan	Nomenkl	atur	30	P	erubahan I	Nomenklat	tur	100%	Perubahan Nomenklatur			
8	Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran	Persen	100		erubahan			100		erubahan I			100%	Perubahan Nomenklatur			
9	Layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persen	100	P	Perubahan Nomenklatur		100	Perubahan Nomenklatur		tur	100%	Perubahan Nomenklatur					
10	Layanan administrasi keuangan	Persen	100	F	erubahan	Nomenkla	atur	100	Po	erubahan I	Nomenkla	tur	100%		Perubahan N	Nomenklatur	

11	Layanan kebersihan kantor	Persen	100	Perubahan Nomenklatur	100	Perubahan Nomenklatur	100%	Perubahan Nomenklatur
12	Layanan perbaikan peralatan kerja	unit	10	Perubahan Nomenklatur	10	Perubahan Nomenklatur	100%	Perubahan Nomenklatur
13	Jumlah pengadaan Alat Tulis Kantor	buah	2,020	Perubahan Nomenklatur	2,020	Perubahan Nomenklatur	100%	Perubahan Nomenklatur
14	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	lembar	14824 6	Perubahan Nomenklatur	14824 6	Perubahan Nomenklatur	100%	Perubahan Nomenklatur
15	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	unit	12	Perubahan Nomenklatur	12	Perubahan Nomenklatur	100%	Perubahan Nomenklatur
16	Jumlah peralatan Rumah Tangga dan peralatan listrik	buah	322	Perubahan Nomenklatur	322	Perubahan Nomenklatur	100%	Perubahan Nomenklatur
17	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	eksemplar	2,400	Perubahan Nomenklatur	2,400	Perubahan Nomenklatur	100%	Perubahan Nomenklatur
18	Jumlah layanan makan minum	kali	24	Perubahan Nomenklatur	24	Perubahan Nomenklatur	100%	Perubahan Nomenklatur
19	Jumlah koordinasi dan konsultasi	kali	512	Perubahan Nomenklatur	512	Perubahan Nomenklatur	100%	Perubahan Nomenklatur
20	Jumlah tenaga PTHL	orang	11	Perubahan Nomenklatur	11	Perubahan Nomenklatur	100%	Perubahan Nomenklatur
21	Tingkat ketersediaan sarpras	Persen	100	Perubahan Nomenklatur	100	Perubahan Nomenklatur	100%	Perubahan Nomenklatur
22	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	unit	50	Perubahan Nomenklatur	50	Perubahan Nomenklatur	100%	Perubahan Nomenklatur
23	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	unit	46	Perubahan Nomenklatur	46	Perubahan Nomenklatur	100%	Perubahan Nomenklatur
24	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	unit	4	Perubahan Nomenklatur	4	Perubahan Nomenklatur	100%	Perubahan Nomenklatur
25	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	unit	10	Perubahan Nomenklatur	10	Perubahan Nomenklatur	100%	Perubahan Nomenklatur

26	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Persen	100	Perubahan Nomenklatur			100	Perubahan Nomenklatur				100%	Perubahan Nomenklatur				
27	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek dan sosialisasi	Orang	2	Perubahan Nomenklatur				2	Pe	erubahan	Nomenkla	tur	100%	Perubahan Nomenklatur			
28	Persentase capaian kinerja dan kehadiran bulanan	Persen	100	Perubahan Nomenklatur				100	Pe	erubahan	Nomenkla	tur	100%	Perubahan Nomenklatur			
29	Tingkat Pelayanan Informasi Publik	Persen	100	Perubahan Nomenklatur				100	Pe	erubahan	Nomenkla	tur	100%	Perubahan Nomenklatur			
30	Persentase kesesuaian substansi perencanaan dan evaluasi sesuai peraturan	Persen	100	F	Perubahan	Nomenkl	atur	100	Perubahan Nomenklatur				100%	Perubahan Nomenklatur			
31	Jumlah dokumen pelaporan dan evaluasi kinerja	Dokumen	3	P	erubahan	Nomenkl	atur	3	Perubahan Nomenklatur			100%	Perubahan Nomenklatur				
32	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Keuangan SKPD	Dokumen	7	P	Perubahan	Nomenkl	atur	7	Perubahan Nomenklatur			100%	Perubahan Nomenklatur				
33	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	5	F	Perubahan	Nomenkl	atur	5	Perubahan Nomenklatur			100%	Perubahan Nomenklatur				
34	Implementasi Aplikasi e- Government dan Pameran	aplikasi dan pameran	1	P	Perubahan	Nomenkl	atur	1	Perubahan Nomenklatur				100%	Perubahan Nomenklatur			
35	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	1.64	Perub ahan Nome nklatur	1.64	1.64	1.64	1.64	Perub ahan Nome nklatur	1.64	1.64	1.64	1.64	Perubah an Nomenkl atur	100%	100%	100%	100%
36	Jumlah Aparatur desa dibina dan diawasi penyenggaraan pemerintahannya	40	Perub ahan Nome nklatur	40	40	40	40	Perub ahan Nome nklatur	40	40	40	40	Perubah an Nomenkl atur	100%	100%	100%	100%
37	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	Perub ahan Nome nklatur	1	1	1	1	Perub ahan Nome nklatur	1	1	1	1	Perubah an Nomenkl atur	100%	100%	100%	100%

38	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	Perub ahan Nome nklatur	1	1	1	1	Perub ahan Nome nklatur	1	1	1	1	Perubah an Nomenkl atur	100%	100%	100%	100%
39	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Dokumen	Perub ahan Nome nklatur	1	1	1	1	Perub ahan Nome nklatur	1	1	1	1	Perubah an Nomenkl atur	100%	100%	100%	100%
40	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	Perub ahan Nome nklatur	1	1	1	1	Perub ahan Nome nklatur	1	1	1	1	Perubah an Nomenkl atur	100%	100%	100%	100%
41	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	Dokumen	Perub ahan Nome nklatur	1	1	1	1	Perub ahan Nome nklatur	1	1	1	1	Perubah an Nomenkl atur	100%	100%	100%	100%
42	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)	%	Perub ahan Nome nklatur	100	100	100	100	Perub ahan Nome nklatur	100	100	100	100	Perubah an Nomenkl atur	100%	100%	100%	100%
43	Persentase peningkatan kapasitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%	Perub ahan Nome nklatur	100	100	100	100	Perub ahan Nome nklatur	100	100	100	100	Perubah an Nomenkl atur	100%	100%	100%	100%
44	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Perub ahan Nome nklatur	5	5	5	5	Perub ahan Nome nklatur	5	5	5	5	Perubah an Nomenkl atur	100%	100%	100%	100%
45	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Perub ahan Nome nklatur	2	2	2	2	Perub ahan Nome nklatur	2	2	2	2	Perubah an Nomenkl atur	100%	100%	100%	100%

46	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Perub ahan Nome nklatur	4	4	4	4	Perub ahan Nome nklatur	4	4	4	4	Perubah an Nomenkl atur	100%	100%	100%	100%
47	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	%	Perub ahan Nome nklatur	100	100	100	100	Perub ahan Nome nklatur	100	100	100	100	Perubah an Nomenkl atur	100%	100%	100%	100%
48	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	Perub ahan Nome nklatur	744	744	744	744	Perub ahan Nome nklatur	744	744	744	744	Perubah an Nomenkl atur	100%	100%	100%	100%
49	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Perub ahan Nome nklatur	3	3	3	3	Perub ahan Nome nklatur	3	3	3	3	Perubah an Nomenkl atur	100%	100%	100%	100%
50	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan	Perub ahan Nome nklatur	3	3	3	3	Perub ahan Nome nklatur	3	3	3	3	Perubah an Nomenkl atur	100%	100%	100%	100%
51	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	Perub ahan Nome nklatur	12	12	12	12	Perub ahan Nome nklatur	12	12	12	12	Perubah an Nomenkl atur	100%	100%	100%	100%
52	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	Perub ahan Nome nklatur	100	100	100	100	Perub ahan Nome nklatur	100	100	100	100	Perubah an Nomenkl atur	100%	100%	100%	100%
53	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Perub ahan Nome nklatur	1	1	1	1	Perub ahan Nome nklatur	1	1	1	1	Perubah an Nomenkl atur	100%	100%	100%	100%
54	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Perub ahan Nome nklatur	1	1	1	1	Perub ahan Nome nklatur	1	1	1	1	Perubah an Nomenkl atur	100%	100%	100%	100%
55	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	Perub ahan Nome nklatur	100	100	100	100	Perub ahan Nome nklatur	100	100	100	100	Perubah an Nomenkl atur	100%	100%	100%	100%

56	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Perub ahan Nome nklatur	10	10	10	10	Perub ahan Nome nklatur	10	10	10	10	Perubah an Nomenkl atur	100%	100%	100%	100%
57	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Perub ahan Nome nklatur	200	200	200	200	Perub ahan Nome nklatur	200	200	200	200	Perubah an Nomenkl atur	100%	100%	100%	100%
58	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	Perub ahan Nome nklatur	100	100	100	100	Perub ahan Nome nklatur	100	100	100	100	Perubah an Nomenkl atur	100%	100%	100%	100%
59	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Perub ahan Nome nklatur	12	12	12	12	Perub ahan Nome nklatur	12	12	12	12	Perubah an Nomenkl atur	100%	100%	100%	100%
60	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Perub ahan Nome nklatur	12	12	12	12	Perub ahan Nome nklatur	12	12	12	12	Perubah an Nomenkl atur	100%	100%	100%	100%
61	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Perub ahan Nome nklatur	12	12	12	12	Perub ahan Nome nklatur	12	12	12	12	Perubah an Nomenkl atur	100%	100%	100%	100%
62	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Perub ahan Nome nklatur	12	12	12	12	Perub ahan Nome nklatur	12	12	12	12	Perubah an Nomenkl atur	100%	100%	100%	100%
63	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	Perub ahan Nome nklatur	12	12	12	12	Perub ahan Nome nklatur	12	12	12	12	Perubah an Nomenkl atur	100%	100%	100%	100%
64	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Perub ahan Nome nklatur	12	12	12	12	Perub ahan Nome nklatur	12	12	12	12	Perubah an Nomenkl atur	100%	100%	100%	100%
65	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Perub ahan Nome nklatur	12	12	12	12	Perub ahan Nome nklatur	12	12	12	12	Perubah an Nomenkl atur	100%	100%	100%	100%

66	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	Perub ahan Nome nklatur	1	1	1	1	Perub ahan Nome nklatur	1	1	1	1	Perubah an Nomenkl atur	100%	100%	100%	100%
67	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	Perub ahan Nome nklatur	40	40	40	40	Perub ahan Nome nklatur	40	40	40	40	Perubah an Nomenkl atur	100%	100%	100%	100%
68	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Perub ahan Nome nklatur	12	12	12	12	Perub ahan Nome nklatur	12	12	12	12	Perubah an Nomenkl atur	100%	100%	100%	100%
69	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Perub ahan Nome nklatur	12	12	12	12	Perub ahan Nome nklatur	12	12	12	12	Perubah an Nomenkl atur	100%	100%	100%	100%
70	Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Perub ahan Nome nklatur	-	1	-	-	Perub ahan Nome nklatur	-	-	-	-	Perubah an Nomenkl atur	100%	100%	100%	100%
71	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Perub ahan Nome nklatur	35	35	35	35	Perub ahan Nome nklatur	35	35	35	35	Perubah an Nomenkl atur	100%	100%	100%	100%
72	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Perub ahan Nome nklatur	1	1	1	1	Perub ahan Nome nklatur	1	1	1	1	Perubah an Nomenkl atur	100%	100%	100%	100%
73	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Perub ahan Nome nklatur	4	4	4	4	Perub ahan Nome nklatur	4	4	4	4	Perubah an Nomenkl atur	100%	100%	100%	100%
74	Persentase Desa Mandiri di Provinsi Lampung (Indikator Tujuan Renstra Perubahan 2019-2024)	Persen	12.78	14.6 4	12.86	15.84	25.73	15.19	15.19	16.32	14.63	18.13	118.86	103.76	126.91	92.36	70.46
75	Persentase Penurunan Jumlah Desa Tertinggal (Indikator Sasaran IKU 2019-2024)	Persen	8.42	4.27	1.27	0.15	0.15	9.52	5.25	1.56	0.16	0.16	106.67	113.06	122.95	122.83	106.67
76	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri (Indikator Sasaran IKU 2019-2024)	Persen	4.36	10.3 7	11.59	15.69	25.58	5.67	11.07	13.07	17.97	30.9	544.97	130.05	106.75	112.77	114.53

77	Persentase lembaga ekonomi desa dan kawasan pedesaan yang volume usahanya meningkat	Persen	10,64	Perubahan Nomenklatur	10,64	Perubahan Nomenklatur	100%	Perubahan Nomenklatur
78	Jumlah peserta yang dilatih	orang	300	Perubahan Nomenklatur	300	Perubahan Nomenklatur	100%	Perubahan Nomenklatur
79	Jumlah peserta yang dilatih	orang	40	Perubahan Nomenklatur	40	Perubahan Nomenklatur	100%	Perubahan Nomenklatur
80	Jumlah peserta yang dilatih	orang	40	Perubahan Nomenklatur	40	Perubahan Nomenklatur	100%	Perubahan Nomenklatur
81	Persentase lembaga sosial masyarakat yang aktif secara mandiri 2. Persentase lembaga adat yang berfungsi (aktif memberikan masukan dalam pembangunan desa)	Persen	2.1	Perubahan Nomenklatur	2.1	Perubahan Nomenklatur	100%	Perubahan Nomenklatur
82	Jumlah desa tertinggal	Desa tertinggal	19	Perubahan Nomenklatur	19	Perubahan Nomenklatur	100%	Perubahan Nomenklatur
83	Jumlah kegiatan pokja dan sekretariat	Pokja	5	Perubahan Nomenklatur	5	Perubahan Nomenklatur	100%	Perubahan Nomenklatur
84	Jumlah peserta yang dilatih	Orang	50	Perubahan Nomenklatur	50	Perubahan Nomenklatur	100%	Perubahan Nomenklatur
85	Jumlah peserta yang dilatih	Orang	80	Perubahan Nomenklatur	80	Perubahan Nomenklatur	100%	Perubahan Nomenklatur
86	Jumlah kab/kota yang berpartisipasi	Kab/Kota	15	Perubahan Nomenklatur	15	Perubahan Nomenklatur	100%	Perubahan Nomenklatur
87	Persentase Kader Pengelolaan SDA dan TTG Pedesaan yang aktif 2. Persentase Desa yang menerapkan TTG dalam pengelolaan SDA	Persen	12.51	Perubahan Nomenklatur	12.51	Perubahan Nomenklatur	100%	Perubahan Nomenklatur
88	Jumlah paket pameran dari 15 Kabupaten/Kota dan kader dibina 200 orang	Kab/Kota dan Orang	1	Perubahan Nomenklatur	1	Perubahan Nomenklatur	100%	Perubahan Nomenklatur
89	Jumlah peserta yang dilatih	Orang	45	Perubahan Nomenklatur	45	Perubahan Nomenklatur	100%	Perubahan Nomenklatur
90	Jumlah kader masyarakat yang dilatih	Orang	50	Perubahan Nomenklatur	50	Perubahan Nomenklatur	100%	Perubahan Nomenklatur
91	Peningkatan Kapasitas Jumlah penempatan transmigrasi ke luar lampung (KK)	KK	25	Perubahan Nomenklatur	25	Perubahan Nomenklatur	100%	Perubahan Nomenklatur
92	Jumlah calon transmigrasi yang ditempatkan	KK	45	Perubahan Nomenklatur	45	Perubahan Nomenklatur	100%	Perubahan Nomenklatur

93	Jumlah masyarakat yang diberdayakan dalam Peningkatan Usaha Ekonomi Kemitraan di kawasan	Orang	50	F	erubahan	Nomenkl	atur	50	Pe	erubahan	Nomenkla	tur	100%		Perubahan N	omenklatur	
94	Jumlah dokumen identifikasi sarana dan prasarana yang tersusun	Dokumen	1	F	erubahan	Nomenkl	atur	1	Pe	erubahan	Nomenkla	tur	100%		Perubahan N	omenklatur	
95	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	0.53	Perub ahan Nome nklatur	0.53	0.53	0.53	0.53	Perub ahan Nome nklatur	0.53	0.53	0.53	0.53	Perubah an Nomenkl atur	100%	100%	100%	100%
96	Jumlah Kerjasama yang menjadi Kewenangan Provinsi	1	Perub ahan Nome nklatur	1	1	1	1	Perub ahan Nome nklatur	1	1	1	1	Perubah an Nomenkl atur	100%	100%	100%	100%
97	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	Perub ahan Nome nklatur	1	1	1	1	Perub ahan Nome nklatur	1	1	1	1	Perubah an Nomenkl atur	100%	100%	100%	100%
98	Persentase peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persen	Perub ahan Nome nklatur	1.64	1.64	1.64	1.64	Perub ahan Nome nklatur	1.64	1.64	1.64	1.64	Perubah an Nomenkl atur	100%	100%	100%	100%
99	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina	40	Perub ahan Nome nklatur	40	40	40	40	Perub ahan Nome nklatur	40	40	40	40	Perubah an Nomenkl atur	100%	100%	100%	100%
100	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	Perub ahan Nome nklatur	1	1	1	1	Perub ahan Nome nklatur	1	1	1	1	Perubah an Nomenkl atur	100%	100%	100%	100%
101	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	Lembaga	Perub ahan Nome nklatur	1	1	1	1	Perub ahan Nome nklatur	1	1	1	1	Perubah an Nomenkl atur	100%	100%	100%	100%

102	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	Perub ahan Nome nklatur	1	1	1	1	Perub ahan Nome nklatur	1	1	1	1	Perubah an Nomenkl atur	100%	100%	100%	100%
103	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	Perub ahan Nome nklatur	1	1	1	1	Perub ahan Nome nklatur	1	1	1	1	Perubah an Nomenkl atur	100%	100%	100%	100%
104	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	Perub ahan Nome nklatur	1	1	1	1	Perub ahan Nome nklatur	1	1	1	1	Perubah an Nomenkl atur	100%	100%	100%	100%
105	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Laporan	Perub ahan Nome nklatur	1	1	1	1	Perub ahan Nome nklatur	1	1	1	1	Perubah an Nomenkl atur	100%	100%	100%	100%
106	Persentase penyelesaian pemilikan lahan di 1 (satu) Kawasan Transmigrasi	%	Perub ahan Nome nklatur	100	100	100	100	Perub ahan Nome nklatur	100	100	100	100	Perubah an Nomenkl atur	100%	100%	100%	100%
107	Jumlah kawasan transmigrasi yang diselesaikan masalah lahannya	Kawasan Transmigr asi	Perub ahan Nome nklatur	1	1	1	1	Perub ahan Nome nklatur	1	1	1	1	Perubah an Nomenkl atur	100%	100%	100%	100%
108	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	Kawasan Transmigr asi	Perub ahan Nome nklatur	1	1	1	1	Perub ahan Nome nklatur	1	1	1	1	Perubah an Nomenkl atur	100%	100%	100%	100%
109	Persentase calon peserta transmigran yang difasilitasi untuk dibina di 2 (dua) kawasan transmigrasi	%	Perub ahan Nome nklatur	100	100	100	100	Perub ahan Nome nklatur	100	100	100	100	Perubah an Nomenkl atur	100%	100%	100%	100%
110	Jumlah transmigran keluar lampung	30 KK	Perub ahan Nome nklatur	30	30	30	30	Perub ahan Nome nklatur	30	30	30	30	Perubah an Nomenkl atur	100%	100%	100%	100%
111	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 Daerah Kab/Kota	Laporan	Perub ahan Nome nklatur	1	1	1	1	Perub ahan Nome nklatur	1	1	1	1	Perubah an Nomenkl atur	100%	100%	100%	100%

112	Persentase identifikasi	%	Perub	%	100	100	100	Perub	100	100	100	100	Perubah	100%	100%	100%	100%
	sarana dan prasarana di 1		ahan					ahan					an				
	(satu) kawasan		Nome					Nome					Nomenkl				
	transmigrasi		nklatur					nklatur					atur				
113	Jumlah satuan	1	Perub	1	1	1	1	Perub	1	1	1	1	Perubah	100%	100%	100%	100%
	permukiman yang		ahan					ahan					an				
	dikembangkan		Nome					Nome					Nomenkl				
			nklatur					nklatur					atur				
114	Jumlah Kepala Keluarga	KK	Perub	50	50	50	50	Perub	50	50	50	50	Perubah	100%	100%	100%	100%
	Transmigran yang dibina		ahan					ahan					an				
			Nome					Nome					Nomenkl				
			nklatur					nklatur					atur				

				Tabel 8.	г-С 24 An	ggaran daı	า Realis	asi Pend	anaan Pe	layanan [Dinas PM	DT					
		Ang	ggaran pada Ta	hun			Realis	asi Angga	ran pada			Rasio a	ntara Real	isasi dan		Ra	ta-rata
Uraian			ke-					Tahun ke)-			Angg	jaran Tahi	un ke-		Pertu	ımbuhan
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggara n	Realisasi
Layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	269,738, 400.00					231,897, 955.00					85.97					0.00	0.00
Layanan administrasi keuangan	321,229, 100.00					316,670, 000.00					98.58					0.00	0.00
Layanan kebersihan kantor	3,000,00 0.00					3,000,00 0.00					100.00					0.00	0.00
Layanan perbaikan peralatan kerja	5,750,00 0.00					5,730,00 0.00					99.65					0.00	0.00
Jumlah pengadaan Alat Tulis Kantor	32,032,7 00.00					31,991,7 00.00					99.87					0.00	0.00
Jumlah barang cetakan dan penggandaan	32,405,5 00.00					32,397,5 00.00					99.98					0.00	0.00
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	144,364, 000.00					135,491, 500.00					93.85					0.00	0.00
Jumlah peralatan Rumah Tangga dan peralatan listrik	9,875,00 0.00					9,846,50 0.00					99.71					0.00	0.00
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	7,500,00 0.00					7,500,00 0.00					100.00					0.00	0.00
Jumlah layanan makan minum	76,425,0 00.00					76,416,0 00.00					99.99					0.00	0.00

Jumlah koordinasi dan konsultasi	1412725 285	1412725 285	99.97	0.00	
Jumlah tenaga PTHL	270,100, 000.00	270,100, 000.00	100.00	0.00	
Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	65,087,5 00.00	65,087,5 00.00	100.00	0.00 0.00	
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	250,000, 000.00	245,206, 000.00	98.08	0.00 0.00	
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasion al	201,671, 200.00	188,343, 270.00	93.39	0.00 0.00	
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	20,000,0	19,300,0 00.00	96.50	0.00	
Jumlah ASN yang mengikuti bimtek dan sosialisasi	12,900,0 00.00	12,890,0 00.00	99.92	0.00 0.00	
Persentase capaian kinerja dan kehadiran bulanan	765,000. 00	760,000. 00	99.35	0.00 0.00	
Tingkat Pelayanan Informasi Publik	123,414, 000.00	123,213, 000.00	99.84	0.00 0.00	_
Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Keuangan SKPD	24,975,0 00.00	19,412,0 00.00	77.73	0.00	

Jumlah Dokumen Perencanaan	38,215,6 00.00	36,701,5 00.00	96.04	0.00 0.00
Implementasi Aplikasi e- Government dan Pameran	72,185,0 00.00	67,895,0 00.00	94.06	0.00 0.00
Jumlah desa / kelurahan terbaik	0	0	0.00	0.00 0.00
Jumlah Kab/Kota yang dimonitoring dan dinilai	5,090,00 0.00	4,925,00 0.00	96.76	0.00 0.00
Jumlah peserta yang dilatih	0	0	0.00	0.00 0.00
Jumlah desa berbasis digital	167,949, 000.00	167,948, 900.00	100.00	0.00 0.00
Jumlah peserta yang dilatih	88,934,1 00.00	88,888,0 00.00	99.95	0.00 0.00
Jumlah peserta yang dilatih	0	0	0.00	0.00 0.00
Jumlah peserta yang dilatih	30,550,0 00.00	30,550,0 00.00	100.00	0.00 0.00
Jumlah kegiatan pokja dan sekretariat	727,290, 000.00	727,269, 500.00	100.00	0.00 0.00
Jumlah peserta yang dilatih	1,885,50 0.00	1,885,50 0.00	100.00	0.00 0.00
Jumlah peserta yang dilatih	7,950,00 0.00	7,900,00 0.00	99.37	0.00 0.00
Jumlah kab/kota yang berpartisipasi	0	0	0.00	0.00 0.00
Jumlah desa tertinggal	356,071, 850.00	347,152, 900.00	97.50	0.00 0.00

Jumlah paket pameran dari 15 Kabupaten/Kota dan kader dibina 200 orang	2,750,00 0.00			2,750,00 0.00			100.00			0.00	0.00
Jumlah peserta yang dilatih	20,840,5 00.00			20,840,5 00.00			100.00			0.00	0.00
Jumlah masyarakat yang diberdayakan dalam Peningkatan Usaha Ekonomi Kemitraan di kawasan	6,153,80 0.00			6,022,80 0.00			97.87			0.00	0.00
Jumlah dokumen identifikasi sarana dan prasarana yang tersusun	20,125,2 00.00			19,869,8 00.00			98.73			0.00	0.00
Jumlah dokumen pelaporan dan evaluasi kinerja	50,900,0 00.00			50,900,0 00.00			100.00			0.00	0.00
Jumlah kader masyarakat yang dilatih	0			0			0.00			0.00	0.00
Jumlah calon transmigrasi yang ditempatkan	6,752,75 0.00			6,179,50 0.00			91.51			0.00	0.00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH PROVINSI	149,824, 466	150,000,000	15,277,3 36,641	12,427,8 08,863	146,80 7,666	145,45 4,400	14,965,7 98,181	11,995,6 95,411	97.99	96.97	97.96	96.52	3,355.4 5	3,389.41
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	149,824, 466	150,000,000	150,000, 000	150,000, 000	146,80 7,666	145,45 4,400	150,000, 000	149,808, 200	97.99	96.97	100.00	99.87	0.04	0.69
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60,000,0	44,175,534	45,000,0 00	45,000,0 00	59,571 ,200	44,151 ,600	45,000,0 00	44,979,9 00	99.29	99.95	100.00	99.96	8.17	8.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	64,000,0 00	50,000,000	50,000,0 00	50,000,0 00	63,773 ,000	49,997 ,800	50,000,0 00	49,863,2 00	99.65	100.00	100.00	99.73	7.29	7.29
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25,824,4 66	55,824,466	55,000,0 00	55,000,0 00	23,463 ,466	51,305 ,000	55,000,0 00	54,965,1 00	90.86	91.90	100.00	99.94	38.23	41.93
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13,719,6 90,165	1013432111 6	9,497,57 7,001	8,475,45 5,314	13156 20161 2	97802 19614	9,187,61 5,498	8,110,12 2,410	95.89	96.51	96.74	95.69	14.39	14.48
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,653,02 1,165	8,659,321,1 16	8,232,57 7,001	8,424,95 5,314	80914 47212	83052 64615	7,922,61 5,498	8,059,63 3,710	93.51	95.91	96.23	95.66	0.84	0.08
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD	4,980,00 0,000	1,400,000,0 00	1,200,00 0,000	0	49800 00000	14000 00000	1,200,00 0,000	0	100.00	100.00	100.00	0.00	62.06	62.06

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	34,069,0 00	25,000,000	25,000,0 00	25,000,0 00	34,068 ,400	24,955 ,000	25,000,0 00	24,997,4 00	100.00	99.82	100.00	99.99	8.87	8.86
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/ Semesteran SKPD	52,600,0 00	50,000,000	40,000,0 00	25,500,0 00	50,686 ,000	49,999 ,999	40,000,0 00	25,491,3 00	96.36	100.00	100.00	99.97	20.40	19.21
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20,770,0	50,000,000	30,000,0	70,000,0 00	17,859 ,000	50,000 ,000	30,000,0	69,985,4 00	85.98	100.00	100.00	99.98	78.02	91.09
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	25,959,000	15,959,0 00	25,959,0 00	0	25,959 ,000	15,959,0 00	25,957,2 00	0.00	100.00	100.00	99.99	8.05	8.04
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20,770,0 00	24,041,000	14,041,0 00	44,041,0 00	17,859 ,000	24,041 ,000	14,041,0 00	44,028,2 00	85.98	100.00	100.00	99.97	62.60	68.86
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	76,650,0 00	500,650,000	274,450, 000	530,000, 000	75,500 ,000	499,66 3,900	274,450, 000	515,895, 300	98.50	99.80	100.00	97.34	200.37	201.57
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	76,650,0 00	100,650,000	181,650, 000	180,000, 000	75,500 ,000	100,65 0,000	181,650, 000	167,310, 000	98.50	100.00	100.00	92.95	36.96	35.30
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	0	400,000,000	92,800,0 00	350,000, 000	0	399,01 3,900	92,800,0 00	348,585, 300	0.00	99.75	100.00	99.60	66.79	66.30

Administrasi Umum Perangkat Daerah	3,447,; 8,092	3,632,061,1 00	4,104,11 7,240	2,067,16 9,200	-	31852 37470	36318 52654	4,104,08 3,499	2,045,53 8,116	92.39	99.99	100.00	98.95	10.43	7.71
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	14,495 00	,6 24,495,600	34,495,6 00	44,495,6 00		4,312 500	24,495 ,600	34,495,6 00	44,434,6 00	98.74	100.00	100.00	99.86	46.27	46.93
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	330,71 200	0, 162,582,450	182,740, 000	250,000, 000		327,71 0,170	162,58 1,500	182,706, 400	229,090, 000	99.09	100.00	99.98	91.64	0.54	4.21
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26,719 00	,6 25,000,000	25,000,0 00	30,000,0		24,859 400	25,000 ,000	25,000,0 00	30,000,0 00	93.04	100.00	100.00	100.00	4.52	6.86
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25,000 00	,0 25,000,000	25,000,0 00	25,000,0 00		25,000 000	25,000 ,000	25,000,0 00	25,000,0 00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
Penyediaan Bahan / Material	32,908 00	,2 34,908,200	284,908, 200	34,908,2 00		32,112 000	34,908 ,200	284,908, 200	34,907,6 00	97.58	100.00	100.00	100.00	211.50	212.37
Fasilitasi Kunjungan Tamu	69,538 00	,0 1,200,000,0	1,065,25 0,000	100,000,		69,319 000	12000 00000	1,065,25 0,000	99,382,3 00	99.69	100.00	100.00	99.38	507.94	509.74
Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2,773,0 6,492	2,069,902,8 50	1,927,50 9,141	1,226,89 0,400		25346 32397	20698 94154	1,927,50 9,000	1,226,85 0,816	91.40	100.00	100.00	100.00	22.86	20.52
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	175,10 000	0, 90,172,000	559,214, 299	355,875, 000		57,27 2,003	89,973 ,200	559,214, 299	355,872, 800	89.82	99.78	100.00	100.00	145.10	147.46

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	407,056, 400	407,056,400	566,516, 400	680,684, 349	406,85 6,400	375,30 6,944	564,973, 584	654,361, 485	99.95	92.20	99.73	96.13	19.78	19.53
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	146,056, 400	146,056,400	96,516,4 00	126,484, 349	146,05 6,400	114,30 6,944	95,173,5 84	104,741, 485	100.00	78.26	98.61	82.81	0.96	9.47
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	261,000, 000	261,000,000	470,000, 000	554,200, 000	260,80 0,000	261,00 0,000	469,800, 000	549,620, 000	99.92	100.00	99.96	99.17	32.66	32.36
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	315,228, 000	364,617,800	654,676, 000	454,500, 000	308,61 1,500	338,99 6,300	654,675, 600	449,984, 500	97.90	92.97	100.00	99.01	21.55	23.90
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	145,176, 000	170,176,000	500,176, 000	250,000, 000	142,25 5,750	157,51 0,000	500,175, 600	245,574, 500	97.99	92.56	100.00	98.23	53.71	59.12
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24,500,0 00	24,500,000	24,500,0 00	24,500,0 00	24,100 000	16,600 ,000	24,500,0 00	24,410,0 00	98.37	67.76	100.00	99.63	0.00	5.37
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	145,552, 000	169,941,800	130,000, 000	180,000, 000	142,25 5,750	164,88 6,300	130,000, 000	180,000, 000	97.74	97.03	100.00	100.00	10.57	11.07

PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	141,646, 000	103,000,000	140,000, 000	1,000,00 0,000	128,44 9,000	102,99 9,300	140,000, 000	1,000,00 0,000	90.68	100.00	100.00	100.00	207.64	210.13
Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	141,646, 000	103,000,000	140,000, 000	1,000,00 0,000	128,44 9,000	102,99 9,300	140,000, 000	1,000,00 0,000	90.68	100.00	100.00	100.00	207.64	210.13
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	141,646, 000	103,000,000	140,000, 000	1,000,00 0,000	128,44 9,000	102,99 9,300	140,000, 000	1,000,00 0,000	90.68	100.00	100.00	100.00	207.64	210.13
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHA N DESA	2,099,59 8,000	2,099,437,9 50	2,200,00 0,000	1,563,52 3,100	20709 85664	20924 28850	2,199,91 0,000	1,468,99 6,100	98.64	99.67	100.00	93.95	8.05	9.02
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraa n Pemerintahan Desa	2,099,59 8,000	2,099,437,9 50	2,200,00 0,000	1,563,52 3,100	20709 85664	20924 28850	2,199,91 0,000	1,468,99 6,100	98.64	99.67	100.00	93.95	8.05	9.02
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	101,505, 000	201,505,000	100,000, 000	0	101,50 5,000	201,31 5,000	100,000,	0	100.00	99.91	100.00	0.00	17.29	17.33
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	280,556, 000	240,000,000	286,000, 000	329,000, 000	280,20 4,400	234,88 6,000	285,910, 000	316,050, 000	99.87	97.87	99.97	96.06	6.58	5.36

Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	151,505, 000	200,000,000	200,000,	474,243, 100	151,19 0,000	199,64 8,900	200,000,	473,443, 100	99.79	99.82	100.00	99.83	56.38	56.32
Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	353,969, 000	426,561,750	140,000,	319,640, 000	331,42 1,000	425,43 5,750	140,000,	240,284, 000	93.63	99.74	100.00	75.17	27.21	10.97
Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten / Kota	1,212,06 3,000	1,031,371,2 00	1,474,00 0,000	440,640, 000	12066 65264	10311 43200	1,474,00 0,000	439,219, 000	99.55	99.98	100.00	99.68	14.03	13.93
PROGRAM PEMBERDAYA AN LEMBAGA KEMASYARAK ATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1,340,32 9,500	2,517,972,5 00	1,765,09 0,640	3,405,26 8,630	12851 61000	25090 38806	1,764,85 0,640	3,399,82 2,204	95.88	99.65	99.99	99.84	50.30	52.74

Pemberdayaan Lembaga kemasyarakata n yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten / Kota	1,340,32 9,500	2,517,972,5 00	1,765,09 0,640	3,405,26 8,630	12851 61000	25090 38806	1,764,85 0,640	3,399,82 2,204	95.88	99.65	99.99	99.84	50.30	52.74
Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	132,674, 000	180,000,000	200,000,	0	132,67 4,000	173,10 0,000	200,000, 000	0	100.00	96.17	100.00	0.00	17.74	18.00
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakata n Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	289,854, 000	350,000,000	696,090, 640	289,975, 500	289,85 3,500	349,95 0,000	696,090, 640	289,413, 000	100.00	99.99	100.00	99.81	20.43	20.41

Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	251,333, 500	228,333,500	140,000, 000	1,544,42 3,330		251,33 3,500	228,33 3,400	140,000, 000	1,542,11 3,800	100.00	100.00	100.00	99.85	318.44	317.89
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	456,829, 000	500,000,000	699,000, 000	309,821, 000		456,82 9,000	498,32 0,000	698,760, 000	309,591, 000	100.00	99.66	99.97	99.93	2.14	2.13
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	209,639, 000	59,639,000	30,000,0 00	61,048,8 00		154,47 1,000	59,639 ,000	30,000,0 00	61,032,6 00	73.68	100.00	100.00	99.97	5.92	2.55
Fasilitasi tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraa n Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	0	1,200,000,0 00	0	1,200,00 0,000	0		11996 96406	0	1,197,67 1,804	0.00	99.97	0.00	99.81	0.00	33.33
PROGRAM PERENCANAA N KAWASAN TRANSMIGRA SI	106,134, 200	150,000,000	550,000, 000	100,000,		53,737 800	102,47 7,000	550,000, 000	94,712,0 00	50.63	68.32	100.00	94.71	75.39	148.21
Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	106,134, 200	150,000,000	550,000, 000	100,000,		53,737 800	102,47 7,000	550,000, 000	94,712,0 00	50.63	68.32	100.00	94.71	75.39	148.21

Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	106,134, 200	150,000,000	550,000, 000	100,000,	53,737 ,800	102,47 7,000	550,000, 000	94,712,0 00	50.63	68.32	100.00	94.71	75.39	148.21
PROGRAM PEMBANGUNA N KAWASAN TRANSMIGRA SI	138,060, 000	150,000,000	90,800,0	80,650,0 00	115,75 2,000	123,50 0,000	89,231,0 67	70,514,0 00	83.84	82.33	98.27	87.43	14.00	14.01
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	138,060, 000	150,000,000	90,800,0	80,650,0 00	115,75 2,000	123,50 0,000	89,231,0 67	70,514,0 00	83.84	82.33	98.27	87.43	14.00	14.01
Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	138,060, 000	150,000,000	90,800,0	80,650,0 00	115,75 2,000	123,50 0,000	89,231,0 67	70,514,0 00	83.84	82.33	98.27	87.43	14.00	14.01
PROGRAM PENGEMBANG AN KAWASAN TRANSMIGRA SI	150,194, 530	200,194,530	198,000, 000	125,000, 000	106,35 6,230	191,28 5,930	198,000, 000	124,596, 000	70.81	95.55	100.00	99.68	1.56	15.43
Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	150,194, 530	200,194,530	198,000, 000	125,000, 000	106,35 6,230	191,28 5,930	198,000, 000	124,596, 000	70.81	95.55	100.00	99.68	1.56	15.43

Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	150,194, 530	200,194,530	198,000, 000	125,000, 000	106,35 6,230	191,28 5,930	198,000, 000	124,596, 000	70.81	95.55	100.00	99.68	1.56	15.43
											TOTAL	•	523.60	541.84

Berdasarkan Tabel T-C.24 tersebut dapat simpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung telah melaksanakan Tupoksi Kinerja Prioritas berdasarkan Renstra 2019-2024 dengan capaian Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran sebesar 523.60% dan Capaian Rata-Rata Realisasi 541.84%.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung

Adapun Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung terdiri dari :

- 1. Aparatur Desa/Kelurahan
- 2. Desa Pengguna Teknologi Digital
- 3. Lembaga Kemasyarakatan Desa
- 4. Lembaga Ekonomi Desa/Badan Usaha Ekonomi Desa
- 5. Masyarakat Penggiat Teknologi Tepat Guna
- 6. Tenaga Ahli dan Pendamping Desa serta Lokal Desa
- 7. Masyarakat di Kawasan Transmigrasi/Calon Transmigran
- 8. Masyakat di Kawasan Perdesaan

2.1.5 Mitra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung dalam pemberian pelayanan

Pada tahun 2025-2029, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung memiliki Mitra Kerja Antara Lain :

- Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Gubernur Lampung "Desaku Maju", dengan mitra Tenaga Ahli Gubernur Lampung, BPKP, Dinas Koperasi UMKM Provinsi Lampung dan Bank Indonesia.
- Kegiatan "Karyabakti Pembangunan Kawasan Perdesaan Provinsi Lampung" dengan mitra KOREM 043 Garuda Hitam.

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Dinas PMDT

Pada tahun 2025-2029 telah terdapat Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Dinas PMDT dalam bentuk kerjasama dengan Bank Lampung, Bank BRI dan Kimia Farma dalam wadah BUMDesma.

2.1.7 Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggung Jawab Dinas PMDT

Kerjasama Daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung antara lain: "Karyabakti Pembangunan Kawasan Perdesaan Provinsi Lampung" dengan mitra KOREM 043 Garuda Hitam dan Pengiriman Transmigran Keluar Lampung.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1 Permasalahan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung memiliki beberapa permasalahan antara lain:

- 1) Kesenjangan akses terhadap layanan dasar (kesehatan, pendidikan, sanitasi, Jalan,dll). Masih terdapatnya 764 akses di Provinsi Lampung.
- 2) Lemahnya kelembagaan ekonomi desa (BUMDes), angka BUMDes Maju masih berada pada 1.64% (baseline 2024)
- 3) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa terutama pada partisipasi dalam Musrenbang dan Pengawasan Desa.
- 4) Belum optimalnya pemanfaatan Dana Desa, belum keseluruhan 2446 telah menggunakan aplikasi siskeudes secara maksimal.
- 5) Terdapat 4 kawasan transmigrasi di Provinsi Lampung, yaitu Mesuji dan Tulang Bawang berstatus Mandiri. Way Tuba (Way Kanan) dan Ngambur (Pesisir Barat) berstatus Berkembang, masih menghadapi berbagai tantangan dalam menaikkan status menjadi mandiri, dan berdaya saing.

Permasalahan umum meliputi infrastruktur dasar yang belum merata, akses pasar dan permodalan yang terbatas, serta rendahnya kapasitas SDM dan kelembagaan ekonomi lokal serta Masih terdapat beban SHM serta belum masuk dalam rencana pembangunan daerah, data yang belum mutakhir, anggaran terbatas, kewenangan yang belum jelas, dan lemahnya pemantauan perkembangan kawasan.

2.2.2 Isu Strategis

Selain Permasalahan Diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung memiliki beberapa isu strategis antara lain:

1. Isu Strategis 1, Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi di Desa;

Pembangunan daerah masih berfokus pada pertumbuhan ekonomi konvensional yang belum mengintegrasikan prinsip ekonomi hijau secara menyeluruh, padahal peluang besar ada di sektor energi terbarukan, pertanian organik, dan industri daur ulang. Dibutuhkan reformasi tata kelola, penguatan data dan regulasi, integrasi ekonomi hijau dan biru dalam perencanaan pembangunan, serta sinergi lintas sektor untuk memastikan pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi masyarakat Lampung.

Pertumbuhan ekonomi di desa saat ini telah memiliki wadah utama yaitu BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Dalam implementasinya, BUMDes membutuhkan dorongan secara kelembagaan maupun pengelolaan, baik dalam strukturisasi usaha maupun permodalan serta pemasaran produk sehingga dapat memberikan sumbangsih peran dalam peningkatan pendapatan asli desa.

2. Isu Strategis 2, Masih Tingginya Angka Kemiskinan Di Desa

Program-program pengentasan kemiskinan hingga saat ini masih bersifat sektoral dan top-down, tanpa melibatkan perencanaan partisipatif dari masyarakat desa sebagai pelaku utama pembangunan.

Di sisi lain, kelembagaan ekonomi desa seperti BUMDesa yang diharapkan menjadi lokomotif penggerak ekonomi lokal, belum mampu berperan secara optimal akibat berbagai keterbatasan, baik dari sisi

kapasitas kelembagaan, akses pembiayaan, maupun dukungan ekosistem usaha yang berkelanjutan.

Pengentasan kemiskinan di desa membutuhkan program yang fokus dilaksanakan di desa, untuk itu pemerintah pusat mencanangkan program koperasi desa merah putih. Program Koperasi Desa Merah Putih membutuhkan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, yang menggabungkan pemanfaatan data desa secara akurat, pemberdayaan masyarakat sebagai subjek pembangunan, penguatan kelembagaan ekonomi lokal seperti BUMDesa, serta sinergi antarlembaga pemerintah di semua tingkatan.

3. Isu Strategis 3 : Belum optimalnya pemanfaatan ruang fiskal dalam mendukung pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan

Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui dividen belum merata. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, hanya BUMD yang bergerak di sektor jasa keuangan yang secara konsisten memberikan kontribusi dividen kepada daerah. Sementara itu, kinerja BUMD di sektor non-jasa dan non-keuangan belum menunjukkan hasil yang optimal. Kondisi serupa juga terjadi pada sektor pariwisata, di mana kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan daerah masih terbatas, meskipun tren peningkatan kunjungan wisata menunjukkan korelasi positif terhadap penerimaan retribusi dan pajak daerah.

4. Isu Strategis 4 : Peran Iptek dan Inovasi untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Pemanfaatan teknologi digital secara masif diperlukan untuk mendorong produktivitas sektor unggulan seperti pertanian, industri kreatif, dan UMKM, sekaligus meningkatkan efisiensi sistem produksi dan distribusi. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna desa diharapkan dapan menjadi sebuah inovasi yang mendukung pengelolaan potensi desa guna

peningkatan nilai tambah produk dan bahan baku di desa, sehingga

mampu meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan dan menjadi pendapatan bagi desa.

Adapun Permasalahan dan Isu Strategis yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung tersebut, telah dirumuskan sebagai berikut.

Tabel 9. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN	ISU LINGKUNGAN	I DINAMIS YANG RELE PMDT	VAN DENGAN DINAS	ISU STRATEGIS DINAS PMDT
KEWENANGAN		DENGAN PD	GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)
Terdapat 2446 desa di Provinsi Lampung yang dapat dibina aparaturnya	Rendahnya kapasitas aparatur desa	-	Ketidaksetaraan Sosial dan Ekonomi	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Belum optimalnya pemanfaatan ruang fiskal dalam mendukung pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan.	Belum optimalnya pemanfaatan ruang fiskal dalam mendukung pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan
2446 Desa di Provinsi Lampung telah meggunakan aplikasi siskeudes (100%)	Belum optimalnya pemanfaatan Dana Desa	-	Krisis Pangan Global	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Belum optimalnya pemanfaatan ruang fiskal dalam mendukung pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan.	
Program Inkubator Desa Digital dapat menjembatani keterbatasan akses layanan dasar	Kesenjangan akses terhadap layanan dasar (kesehatan, pendidikan, sanitasi, Jalan,dll)	-	Transformasi Digital dan Keamanan Siber	Tata Kelola danAkuntabilitas Pemerintah	Angka kemiskinan yang masih tinggi terutama di Perdesaan	Peran Iptek dan Inovasi untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi
4 Kawasan Transmigrasi di Provinsi Lampung telah terdaftar secara resmi	Terdapat 4 kawasan transmigrasi di Provinsi Lampung, yaitu Mesuji dan Tulang Bawang berstatus Mandiri. Way Tuba (Way Kanan) dan Ngambur (Pesisir Barat) berstatus Berkembang, masih menghadapi Permasalahan umum meliputi infrastruktur dasar yang belum merata, akses pasar dan permodalan yang terbatas, serta rendahnya kapasitas SDM dan kelembagaan ekonomi lokal .	-	Ketidaksetaraan Sosial dan Ekonomi	Rendahnya Kualitas SumbeDaya Manusia	Angka kemiskinan yang masih tinggi terutama di Perdesaan	

Provinsi Lampung	Lemahnya	Pemulihan	Rendahnya	Belum Optimalnya	Belum Optimalnya
memiliki 2433	Pemeringkatan dan	Ekonomi pasca	Produktivitas	Pertumbuhan	Pertumbuhan
BUMDes yang	kelembagaan	Covid-19		Ekonomi	Ekonomi di Desa;
siap dibina	ekonomi desa				
	(BUMDes)				

III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMDT Provinsi Lampung

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Dalam rangka penugasan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung, menjadikan Visi Gubernur Lampung yang tertuang pada Ranwal RPJMD Provinsi Lampung tahun 2025-2029 sebagai visi bersama (shared vision) yaitu "Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas".

Selanjutnya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Ranwal RPJMD Provinsi Lampung 2025-2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung menjadikan misi ke 1 (satu) Gubernur sebagai acuan utama yaitu "Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif".

Sebagai penjabaran misi ke-1 (satu) yaitu "Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif" Dinas PMDT Provinsi Lampung mempunyai TUJUAN RENSTRA "Terwujudnya Ekosistem Ekonomi Berbasis Desa", dengan Indikator Tujuan Renstra yaitu "Persentase Desa Mandiri".

Selanjutnya untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan **2 Sasaran Utama Renstra dan 1 Sasaran Pendukung Renstra,** sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya Desa Mandiri
- 2. Meningkatnya BUMDes Maju
- 3. Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Tabel 10. TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS PMDT PROVINSI LAMPUNG

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG	TUJUAN	SASARAN	IKU	BASELINE (2024)		T.	ARGET T	AHUN			KET
RELEVAN					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Terwujud nya ekosistem ekonomi	Terwujudnya Ekosistem Ekonomi Berbasis Desa		Persentase Desa Mandiri	14.68	21.42	23.96	24.37	24.98	25.22	25.45	Indeks Desa Nasional
berbasis desa	Del pasis Desa	Meningkatnya Desa Mandiri	Persentase Desa Mandiri	14,68 (Berdasarkan Data IDM)	21.42%	23.96%	24.37 %	24.98 %	25.22 %	25.45 %	Rencana Kenaikan 40 desa mandiri pertahun
		Meningkatnya BUMDes Maju	Persentase BUMDes Maju	1.64	2.26%	2.88%	3.5%	4.12 %	4.74 %	5.36 %	Rencana Kenaikan Peringkat 15 BUMDES Maju /tahun
		Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	73.97	75	76	78	80.5 0	81	81.5 2	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan, Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung memiliki beberapa strategi antara lain:

- Melaksanakan Peningkatan kapasitas aparatur dan Lembaga kemasyarakatan desa melalui pelatihan, pembinaan dan monitoring evaluasi, dan optimalisasi penggunaan aplikasi digital dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat serta Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di desa.
- Melaksanakan pembinaan BUMDes secara Profesional, digitalisasi dan kemitraan strategis dengan sektor swasta serta Mendukung Program Nasional Pemberian Makanan Gratis untuk perbaikan gizi dan pengentasan stunting.
- Melaksanakan penyelesaian lahan transmigrasi, peningkatan sarana dan prasarana serta Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan kawasan transmigrasi.

Adapun Kesesuaian Strategi dan Arah Kebijakan antara RPJMD Provinsi Lampung 2025-2029 dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung tahun 2025-2029, terpetakan pada tabel berikut.

Tabel 11. Arah Kebijakan

NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD YANG BERKAITAN DENGAN DINAS PMDT	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS PMDT	KET
1	Terwujudnya ekosistem ekonomi berbasis desa	Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	Mendorong terwujudnya ekosistem Ekonomi Berbasis Desa	

Selain Pemetaan Strategi dan Arah kebijakan pada tabel sebelumnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi (DPMDT) Provinsi Lampung pun telah memetakan Penahapan pembangunan sebagai prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi (DPMDT) Provinsi Lampung disajikan pada tabel berikut;

TABEL 12. PENAHAPAN STRATEGI RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG

Renstra PPMDT Mendorong It-Penguatan jumlah BUMDes dan desa berkembang, maju dan mandiri melalui peningkatan nilai tambah dan revitalisasi tataniaga komoditas unggulan 2.Penguatan produktivitas tenaga kerja sektor ekonomi desa melalui pengembangan program pelatihan berbasis kompetensi 3.Penguatan ekonomi desa melalui Program Terpadu Desaku Maju dan sinergi Perencanaan pembangunan berbasis Evidence Based Policy 4.Penguatan Inovasi layanan dan kelembagaan Pengembangan Pe		
Renstra DPMDT Mendorong terwijudnya ekosistem dekosistem dekosistem dekosistem dekonomi desa melalui peningkatan nilai tambah dan revitalisasi tataniaga komoditas unggulan 2. Penguatan produktivitas tenaga kerja sektor ekonomi desa melalui pengembangan program pelatihan berbasis kompetensi 3. Penguatan ekonomi desa melalui pengembangan program pelatihan berbasis kompetensi 3. Penguatan ekonomi desa melalui pengembangan program pelatihan berbasis kompetensi 3. Penguatan nebasaku Maju dan sinergi Perencanaan pembangunan berbasis Evidence Based Policy 4. Penguatan Inovasi dan penguatan kelembagaan PPID 5. Penguatan Pengembangan inovasi dan penguatan kelembagaan PPID 5. Penguatan penguatan kelembagaan PPID 5. Penguatan penguatan kelembagaan PPID 5. Penguatan pengangan program Desaku Maju dan pengambangan inovasi dan penguatan kelembagaan PPID 5. Penguatan pengagatan pengagan pengagan pengagatan pengagatan pengagatan pengagatan pengagan pe	AHAP I (2026) TAHAP II (2027) TAHAP III (2028) TAHAP IV (2029) TAHAP	P V (2030)
terwujudnya ekosistem berkembang, maju dan berkembang, maju dan mandiri melalui peningkatan nilai tambah dan revitalisasi tataniaga komoditas unggulan 2. Peningkatan nilai tambah dan revitalisasi tataniaga komoditas unggulan 2. Peningkatan produktivitas tengal kerja sektor ekonomi desa melalui pengembangan program pelatihan berbasis kompetensi 3. Penguatan ekosistem ekonomi desa melalui Program Terpadu Desaku Maju dan sinergi Perencanaan pembangunan berbasis Evidence Based Policy 4. Peningkatan Inovasi layanan dan kelembagaan PID 5. Penguatan Pengembangan inovasi dan penguatan kelembagaan Pinosaku Maju dan peningkatan program pelatihan berbasis kompetensi 3. Peningkatan ekosistem ekonomi desa melalui Program Terpadu Desaku Maju dan sinergi Perencanaan pembangunan berbasis Evidence Based Policy 4. Peningkatan Inovasi layanan dan kelembagaan Pengembangan inovasi dan penguatan kelembagaan Pinosaku Maju dan peningkatan partisipasi proaktif dan partisipasi proaktif dan partisipasi subilik Penyediaan informasi secara proaktif dan peningkatan partisipasi masyarakat terhadap Program Desaku Maju dan peningkatan pangan informasi secara proaktif dan peningkatan partisipasi masyarakat terhadap Program Desaku Maju dan peningkatan pangan kerja produktif di desa dalam meningkatkan jumlah desa malalui peningkatan pangan peningkatan peningkatan peningkatan peningkatan peningkatan peningkatan peningkatan peningkatan peningk		(5)
pengangguran dan penciptaan lapangan kerja produktif di desa dalam meningkatkan jumlah desa maju dan mandiri 7.Peningkatan Digitalisasi dan Aksesibilitas Pengembangan infrastruktur untuk mewujudkan Ekosistem Ekonomi Berbasis Desa 7.Penguatan Digitalisasi dan Aksesibilitas Pengembangan infrastruktur untuk mewujudkan Ekosistem Ekonomi Berbasis Desa 8.Peningkatan pembangunan ekonomi daerah yang berdaya saing melalui penguatan, perluasan akses perdagangan, keuangan syariah dan kolaborasi n helix dalam inovasi dan pembangunan ekonomi daerah yang berdaya saing melalui pembangunan ekonomi akses perdagangan, keuangan syariah dan kolaborasi n helix dalam inovasi dan pembangunan ekonomi daerah yang berdaya saing melalui pembangunan ekonomi akses perdagangan, keuangan syariah dan kolaborasi n helix dalam inovasi dan pembangunan ekonomi daerah yang berdaya saing melalui penguatan, perluasan akses perdagangan, keuangan syariah dan kolaborasi n helix dalam inovasi dan pembangunan ekonomi daerah yang berdaya saing melalui penguatan, perluasan akses perdagangan, keuangan syariah dan kolaborasi n helix dalam inovasi dan pembang	Jestian jumlah (Des dan desa berkembang, maju dan mandiri melalui peningkatan nilat ambah dan ekalisasi atanianga komodifas unggulan puntah dan evitalisasi tatanianga komodifas unggulan portakisasi bah dan ekalisasi tatanianga komodifas unggulan produktivitas tenaga a keja sektor ekonomi desa melalui pembangan program pelatihan berbasis kompetensi guatan ekosistem desa melalui pram Terpadu Desaku Maju dan	angan jumlah dan desa ng, maju dan elalui an nilai an revitalisasi komoditas angan tas tenaga or ekonomi alui angan ekonomi lalui angan ekonomi lui Program ekonomi lui Program lesaku Maju ji aan inan berbasis Based Policy angan Inovasi an angan inovasi an angan inovasi attan an PPID angan nsi proaktif dan an partisipasi at terhadap Desaku Maju angan upaya an tingkat n, uran dan n lapangan upaya an tingkat n, uran dan ni lapangan upaya an tingkat n, uran dan angan i dan as angan ur untuk an Ekosistem Berbasis Desa angan unan ekonomi ng berdaya alui n, perluasan dagangan, syariah dan in helix vasi dan

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RENSTRA DINAS PMDT PROVINSI LAMPUNG 2025 -2020

Rencana Strategis (Renstra) DPMDT Provinsi Lampung Tahun 2025–2030 mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025–2029. Dengan demikian, dokumen ini disusun untuk memastikan keterpaduan antara visi dan misi kepala daerah dengan tujuan perangkat daerah (PD), sasaran, indikator, serta *outcome* dan output yang terukur dan relevan. Proses ini dilakukan melalui pendekatan *cascading* (penjabaran kinerja) yang sistematis dan terstruktur.

Cascading dimulai dari Visi Provinsi Lampung, yaitu "Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas", yang diterjemahkan ke dalam Misi 1 RPJMD: Mendorong Ekonomi Yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif". Kemudian diturunkan dalam Tujuan 1.1 RPJMD: "Terwujudnya Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif". Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, Pemerintah Provinsi Lampung merumuskan sejumlah sasaran strategis dalam RPJMD. Sebagai bagian dari peranannya, DPMDT Provinsi Lampung mengadopsi Sasaran 1.1.3 RPJMD yaitu "Terwujutnya Ekosestem Ekonomi berbasis Desa"

Sasaran RPJMD ini selanjutnya dijabarkan ke dalam Tujuan DPMDT , yakni: "Terwujudnya Ekosistem Ekonomi Berbasis Desa".

Dengan 2 sasaran strategis utama dan 1 sasaran strategis pendukung renstra, yaitu:

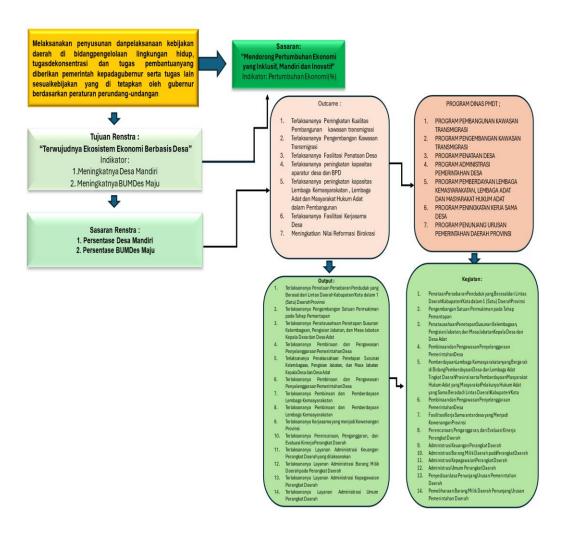
- 1. Meningkatnya Desa Mandiri
- 2. Meningkatnya BUMDes Maju
- 3. Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Untuk memastikan bahwa pencapaian sasaran tersebut dapat diukur secara objektif, maka digunakan indikator-indikator kinerja utama, yaitu :

- 1. Persentase Desa Mandiri
- 2. Persentase BUMDes Maju
- 3. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Adapun *cascading* dari indikator ini melahirkan outcome dan output yang menjadi acuan dalam penetapan program, kegiatan, dan sub kegiatan DPMDT Provinsi Lampung. Cascading perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Renstra DPMDT Provinsi Lampung 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Gambar 2. Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Dinas PMDT Pvovinsi Lampung



Melalui pendekatan ini, maka seluruh intervensi DPMDT Provinsi Lampung akan selaras dengan arah kebijakan RPJMD, sekaligus memastikan bahwa proses pembangunan berjalan secara inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, keterkaitan langsung antara *outcome*, output, serta program dan kegiatan, memastikan adanya akuntabilitas kinerja yang dapat diukur dan dievaluasi secara periodik.

Dengan demikian, rancangan program dan kegiatan dalam Renstra ini bukan hanya respons terhadap mandat regulasi, tetapi juga bagian integral dari upaya menciptakan pemerintahan yang lebih baik, pembangunan yang partisipatif, dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029, melalui tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, Sub Kegiatan, dan indikator kinerja yang disertai pendanaan untuk 5 (lima) tahun kedepan. Sejalan dengan peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, maka penyusunan nomenkelatur program kegiatan dan sub kegiatan di DPMDT mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1- 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, target kinerja, dan pendanaan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi DPMDT Provinsi Lampung yang berfungsi sebagai institusi yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. DPMDT Provinsi Lampung menetapkan rencana program, kegiatan, Sub Kegiatan, yang akan dilaksanakan dalam Tahun 2025-2029,yaitu:

Tabel 13. Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas PMDT Provinsi Lampung

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN		SASARAN	OUTCOME	OUTPUT		INDIKATOR	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	КЕТ
1	2		3	4	5		6	7	8
02.02.05 Lampung Pusat Teknologi Terpadu	Terwujudnya Ekosistem Ekonomi berbasis Desa						Persentase Desa mandiri		
		1.	Meningkatnya Desa Mandiri			1.	Persentase Desa Mandiri		
				Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pembangunan kawasan transmigrasi			Persentase Peningkatan Kualitas Pembangunan kawasan transmigrasi	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
					Terlaksananya Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
								Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

				Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi
				Penyuluhan Transmigrasi
				Pelatihan transmigrasi
				Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi
	Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi		Persentase Pengembangan Kawasan Transmigrasi	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
	Terlaksananya Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Terselenggaranya Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Jumlah Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan
				Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman
	Meningkatnya kualitas penataan desa		Persentase Fasilitasi Penataan Desa	PROGRAM PENATAAN DESA

	Peningkatan Kualitas Penatausaha Penetapan Susunan Kelembagaa Pengisian Jabatan, dan Masa Jabata Kepala Desa Desa Adat	Penat Penet Susu Kelen n, Pengi Jabat Masa Masa n Kepal	tausahaan tapan nan nbagaan,	Jumlah Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat yang dilaksanakan	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat
					Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa
	Peningkatny kualitas pembinaan o pengawasar pemerintaha desa	Penin Ian Apara In dan A	ksananya ngkatan atur Desa Anggota BPD ditingkatkan sitasnya	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
	Peningkatan Pembinaan o Pengawasan Penyelengga Pemerintaha Desa	lan Pemb Apara Iraan dan d n penye	ksanya pinaan atur desa liawasi enggaraan rintahannya	Jumlah Aparatur desa dibina dan diawasi penyenggaraan pemerintahannya	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
					Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
					Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa

								Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis
								Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
								Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota
02.02.02 Pengusaha Muda Berdaya Saing dan Inovatif	Terwujudnya Ekosestem Ekonomi berbasis Desa						Persentase Desa mandiri	
		2.	Meningkatnya BUMDes Maju			2	Persentase BUMDes Maju	
				Peningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
				Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Terlaksanya Pembinaan Aparatur desa dan diawasi penyenggaraan pemerintahannya		Jumlah Aparatur desa dibina dan diawasi penyenggaraan pemerintahannya	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
								Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa

Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat , Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
Pemberdayaan Kema	ah Lembaga asyarakatan dibina Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

							Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
							Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	
							Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	
02.02.02 Pengusaha Muda Berdaya	Terwujutnya Ekosestem Ekonomi berbasis					Persentase Desa mandiri		
Saing dan Inovatif	Desa	2.	Meningkatnya BUMDes Maju		2	Persentase BUMDes Maju		
				Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan		Persentase peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	

	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
	Meningkatnya efektivitas kerja sama desa		Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Kerjasama yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Kerjasama yang menjadi Kewenangan Provinsi	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi
				Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi					
	Meningkatkan Nilai SAKIP OPD				
		Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Dearah		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
					Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
					Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

		Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
		Terlaksananya Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

		Terlaksananya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
					Penyediaan Bahan / Material
					Fasilitasi Kunjungan Tamu

					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
		Terlaksananya Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Terlaksananya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sebagai tindak lanjut dari rumusan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah, serta untuk memastikan ketercapaian kinerja yang telah ditetapkan, maka disusunlah daftar rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilengkapi dengan kebutuhan pendanaannya. Rencana program dan kegiatan tersebut dirancang secara berjenjang dan terukur, selaras dengan kerangka logis pencapaian sasaran, serta mendukung keterpaduan lintas sektor maupun konsistensi antar dokumen perencanaan. Selain itu, penjabaran program hingga tingkat sub kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan arah kebijakan nasional dan provinsi, kapasitas fiskal daerah, serta dinamika kebutuhan pembangunan yang bersifat adaptif.

Tabel di bawah ini menyajikan secara rinci daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan DPMDT Provinsi Lampung untuk periode 2025–2030, lengkap dengan proyeksi pendanaannya. Rangkaian perencanaan tersebut dirancang dalam horizon waktu enam tahun, yakni sejak tahun 2025 hingga tahun 2030, sebagai upaya strategis dalam mewujudkan kinerja perangkat daerah secara bertahap, konsisten, dan berkelanjutan. Penyusunan program hingga tahun 2030 tidak hanya dimaksudkan sebagai pemenuhan terhadap siklus perencanaan jangka menengah, tetapi juga sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip kesinambungan pembangunan (development continuity). Dengan demikian, program yang dirancang untuk tahun 2030 memiliki kedudukan yang strategis, yakni sebagai jembatan antara capaian akhir Renstra 2025–2029 dengan fondasi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2030.

Informasi ini diharapkan menjadi dasar yang kuat dalam proses penyusunan Renja tahunan, sekaligus sebagai alat kendali dalam pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, target kinerja, dan pendanaan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi DPMDT Provinsi Lampung yang berfungsi sebagai institusi yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. DPMDT Provinsi Lampung menetapkan rencana program, kegiatan, Sub Kegiatan, target kinerja, dan pendanaan yang akan dilaksanakan dalam Tahun 2025-2029, yaitu:

Tabel 14. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/	INDIKATOR OUTCOME/	BASELINE 2024										KET			
OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB	OUTPUT	2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
KEGIATAN			TAR GET	PAGU	TARGE T	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Peningkatan Kualitas Pembangunan kawasan transmigrasi	0	25	64,461,120. 00	25	80,000,000.00	25	60,577,654.60	25	62,272,693.24	25	63,518,147.10	25	64,788,510.05	DINAS PMDT
Persentase Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kot a dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0	30	64,461,120. 00	30	80,000,000.00	30	60,577,654.60	30	62,272,693.24	30	63,518,147.10	30	64,788,510.05	DINAS PMDT
Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	1	14,369,110. 00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	DINAS PMDT
Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	20	20	14,369,110. 00	3	20,000,000.00	3	20,577,654.60	3	22,272,693.24	3	23,518,147.10	3	24,788,510.05	DINAS PMDT

Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Verifikasi penduduk yang memiliki tanah dan rumah di kawasan transmigrasi yang berpotensi untuk menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS)	0	0	0.00	3000	35,000,000.00	500	10,000,000.00	500	10,000,000.00	500	10,000,000.00	500	10,000,000.00	DINAS PMDT
Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	0	30	8,499,400.0 0	30	5,000,000.00	30	10,000,000.00	30	10,000,000.00	30	10,000,000.00	30	10,000,000.00	DINAS PMDT
Pelatihan transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	0	30	27,223,500. 00	30	5,000,000.00	30	5,000,000.00	30	5,000,000.00	30	5,000,000.00	30	5,000,000.00	DINAS PMDT
Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	0	1	0.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	DINAS PMDT (1)
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Pengembangan Kawasan Transmigrasi	O	0	0.00	0	0.00	25	50,000,000.00	25	50,000,000.00	25	50,000,000.00	25	50,000,000.00	DINAS PMDT
Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Jumlah Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	O	1	0.00	1	0.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	DINAS PMDT
Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah kepala keluarga transmigran yang bina	C	30	0.00	30	0.00	30	50,000,000.00	30	50,000,000.00	30	50,000,000.00	30	50,000,000.00	DINAS PMDT
PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	0	0	0.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	DINAS PMDT

Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Jumlah Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat yang dilaksanakan	0	0	0.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	DINAS PMDT
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	0	0	0.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	DINAS PMDT
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	0	1.64	472,319,27 5.00	1.64	385,000,000.0	1.64	581,545,484.1 7	1.64	597,817,855.1 1	1.64	609,774,212.2	1.64	621,969,696.4 5	DINAS PMDT
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur desa dibina dan diawasi penyenggaraan pemerintahann ya	0	40	472,319,27 5.00	40	385,000,000.0 0	40	581,545,484.1 7	40	597,817,855.1 1	40	609,774,212.2	40	621,969,696.4 5	DINAS PMDT
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	0	1	21,591,880. 00	1	0.00	1	21,591,880.00	1	25,000,000.00	1	25,000,000.00	1	25,000,000.00	DINAS PMDT
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	0	1	187,153,68 0.00	1	100,000,000.0	1	200,153,680.0	1	200,153,680.0	1	200,153,680.0	1	200,153,680.0	DINAS PMDT
Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	0	40	0.00	40	0.00	40	10,000,000.00	40	12,864,250.94	40	14,820,608.04	40	17,016,092.28	DINAS PMDT (2)

Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	0	1	120,403,21 5.00	1	150,000,000.0 0	1	150,403,215.0 0	1	150,403,215.0 0	1	150,403,215.0 0	1	160,403,215.0 0	DINAS PMDT
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	0	1	21,618,280. 00	1	15,000,000.00	1	77,618,280.00	1	87,618,280.00	1	97,618,280.00	1	97,618,280.00	DINAS PMDT
Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	0	1	21,552,220. 00	1	20,000,000.00	1	21,778,429.17	1	21,778,429.17	1	21,778,429.17	1	21,778,429.17	DINAS PMDT
Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	0	1	100,000,00	1	100,000,000.0	1	100,000,000.0	1	100,000,000.0	1	100,000,000.0	1	100,000,000.0	DINAS PMDT
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakata n, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	0	1.64	712,661,38 0.00	1.64	1,700,000,000 .00	1.64	561,545,484.1 7	1.64	577,817,855.1 1	1.64	589,774,212.2 1	1.64	601,969,696.4	DINAS PMDT

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakata n yang dibina	0	40	712,661,38 0.00	40	1,700,000,000 .00	40	561,545,484.1 7	40	577,817,855.1 1	40	589,774,212.2 1	40	601,969,696.4	DINAS PMDT
Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1	1	5,243,950.0 0	1	0.00	1	5,243,950.00	1	5,243,950.00	1	5,243,950.00	1	5,243,950.00	DINAS PMDT
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Ada Desa/Kelurahan dan MasyarakaHuku m Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaan nya	1	1	530,927,08 0.00	1	750,000,000.0 0	1	430,927,080.0 0	1	230,927,080.0	1	230,927,080.0	1	230,927,080.0	DINAS PMDT
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil FasilitasPemerin tah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	1	24,036,640. 00	1	100,000,000.0	1	24,036,640.00	1	24,036,640.00	1	24,036,640.00	1	24,036,640.00	DINAS PMDT
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	16,272,370.94	1	13,228,728.04	1	16,424,212.28	DINAS PMDT

Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraa n Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1	1	0.00	1	750,000,000.0 0	1	0.00	1	200,000,000.0	1	215,000,000.0 0	1	224,000,000.0	DINAS PMDT
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1	1	152,453,71 0.00	1	100,000,000.0	1	101,337,814.1 7	1	101,337,814.1 7	1	101,337,814.1 7	1	101,337,814.1 7	DINAS PMDT (3)
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	0	0.53	2,000,000,0 00.00	0.53	20,000,000.00	0.53	1,886,993,940 .84	0.53	1,939,794,394 .43	0.53	1,978,590,282 .32	0.53	2,018,162,087 .97	DINAS PMDT
Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan	Jumlah Kerjasama yang menjadi	0	1	2,000,000,0 00.00	1	20,000,000.00	1	1,886,993,940 .84	1	1,939,794,394 .43	1	1,978,590,282 .32	1	2,018,162,087 .97	DINAS PMDT
Provinsi	Kewenangan Provinsi														
	Kewenangan	0	1	2,000,000,0	1	20,000,000.00	1	1,886,993,940 .84	1	1,939,794,394 .43	1	1,978,590,282	1	2,018,162,087 .97	DINAS PMDT
Provinsi Fasilitasi Pembangunan	Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan	73,96	73,97		73,97- 80	20,000,000.00 10,665,000,00 0.00	73,97	1,886,993,940	73,97		73,97 -80	1,978,590,282	73,97	2,018,162,087	DINAS

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	5	9,652,500.0	5	19,652,500.00	5	21,351,000.00	5	21,351,000.00	5	21,351,000.00	5	21,351,000.00	DINAS PMDT
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	2	2	11,499,500. 00	2	21,449,500.00	2	11,499,500.00	2	38,719,355.16	2	38,719,355.16	2	38,719,355.16	DINAS PMDT
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraa n Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	1	0.00	1	5,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	25,000,000.00	1	25,000,000.00	DINAS PMDT
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	1	0.00	1	5,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	25,000,000.00	1	25,000,000.00	DINAS PMDT
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	36,250,000. 00	1	15,000,000.00	1	36,250,000.00	1	36,250,000.00	1	36,250,000.00	1	36,250,000.00	DINAS PMDT
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100	100	11,077,665, 389.30	100	9,514,898,000 .00	100	10,214,898,42 9.58	100	10,354,898,00	100	10,499,807,41 0.24	100	10,649,807,41 0.24	DINAS PMDT
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1008	1008	9,866,994,0 79.30	1008	9,504,226,690 .00	1008	9,504,227,119 .58	1008	9,504,226,690 .00	1008	9,504,226,690 .00	1008	9,504,226,690 .00	DINAS PMDT

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD	1	1	1,200,000,0 00.00	1	0.00	1	700,000,000.0	1	800,000,000.0	1	950,000,000.0	1	1,100,000,000	DINAS PMDT
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3	3	4,836,790.0 0	3	4,836,790.00	3	4,836,790.00	3	24,836,790.00	3	24,836,790.00	3	24,836,790.00	DINAS PMDT
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Sem esteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD	12	12	5,834,520.0 0	12	5,834,520.00	12	5,834,520.00	12	25,834,520.00	12	20,743,930.24	12	20,743,930.24	DINAS PMDT (4)
Administrasi Barang Milik Daerah pada	Persentase Layanan	100	100	10,919,860. 00	100	10,700,000.00	100	10,919,860.00	100	40,919,860.00	100	30,919,860.00	100	30,919,860.00	DINAS PMDT
Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah														
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	1	1	5,933,850.0 0	1	5,800,000.00	1	5,933,850.00	1	15,933,850.00	1	15,933,850.00	1	15,933,850.00	DINAS PMDT
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 100	1 100		1 1 100	5,800,000.00 4,900,000.00 25,000,000.00	1 1 100	5,933,850.00 4,986,010.00 35,000,000.00	1 100	15,933,850.00 24,986,010.00 35,000,000.00	1 1 100	15,933,850.00 14,986,010.00 45,000,000.00	1 100	15,933,850.00 14,986,010.00 45,000,000.00	

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	4	25,000,000. 00	4	25,000,000.00	4	25,000,000.00	4	25,000,000.00	4	25,000,000.00	4	25,000,000.00	DINAS PMDT
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	0	0	0.00	0	0.00	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	200	20,000,000.00	200	20,000,000.00	DINAS PMDT
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	780,590,38 7.00	100	592,300,000.0 0	100	780,590,387.0 0	100	920,090,387.0 0	100	992,590,387.0 0	100	1,094,947,985 .45	DINAS PMDT
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	22	22	22,217,300. 00	22	22,000,000.00	22	22,217,300.00	22	22,217,300.00	22	22,217,300.00	22	22,217,300.00	DINAS PMDT
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	42	42	0.00	42	0.00	42	0.00	42	0.00	42	0.00	42	0.00	DINAS PMDT
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	300	300	7,500,000.0	300	7,500,000.00	300	7,500,000.00	300	7,500,000.00	300	10,000,000.00	300	12,357,598.45	DINAS PMDT
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	500	500	6,250,000.0 0	500	6,300,000.00	500	6,250,000.00	500	6,250,000.00	500	16,250,000.00	500	16,250,000.00	DINAS PMDT
Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	20	20	3,500,000.0	20	3,500,000.00	20	3,500,000.00	20	8,000,000.00	20	18,000,000.00	20	18,000,000.00	DINAS PMDT

Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36	36	25,000,000. 00	36	25,000,000.00	36	25,000,000.00	36	50,000,000.00	36	100,000,000.0	36	100,000,000.0	DINAS PMDT
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	112	112	636,904,76 7.00	112	508,000,000.0	112	636,904,767.0 0	112	736,904,767.0 0	112	736,904,767.0 0	112	836,904,767.0 0	DINAS PMDT
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	79,218,320. 00	1	20,000,000.00	1	79,218,320.00	1	89,218,320.00	1	89,218,320.00	1	89,218,320.00	DINAS PMDT (5)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	12	448,662,08 7.00	12	226,000,000.0	12	448,662,087.0 0	12	448,662,087.0 0	12	448,662,087.0 0	12	448,662,087.0 0	DINAS PMDT
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	87,642,087. 00	12	90,000,000.00	12	87,642,087.00	12	87,642,087.00	12	87,642,087.00	12	87,642,087.00	DINAS PMDT
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	361,020,00 0.00	12	136,000,000.0	12	361,020,000.0	12	361,020,000.0	12	361,020,000.0	12	361,020,000.0	DINAS PMDT
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40	40	404,579,82 3.00	40	230,000,000.0	40	404,579,823.0 0	40	404,579,823.0 0	40	404,579,823.0 0	40	404,579,823.0 0	DINAS PMDT

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4	4	313,857,82 3.00	4	200,000,000.0	4	313,857,823.0 0	4	313,857,823.0 0	4	313,857,823.0 0	4	313,857,823.0 0	DINAS PMDT
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35	35	10,735,000. 00	35	10,000,000.00	35	10,735,000.00	35	10,735,000.00	35	10,735,000.00	35	10,735,000.00	DINAS PMDT
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	1	1	79,987,000. 00	1	20,000,000.00	1	79,987,000.00	1	79,987,000.00	1	79,987,000.00	1	79,987,000.00	DINAS PMDT (6)
	TOTAL			16,054,261, 321.30		12,870,000,00 0.00		15,144,413,65 0.36		15,568,173,31 0.05		15,879,536,77 6.24		16,197,127,51 1.77	

Program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung yaitu pijakan penyusnan Renja Dinas PMDT Tahun 2030. Adapun Program pada tahun 2030 terdiri atas Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Program Administrasi Desa, Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, Program Kerjasama Desa, Program Penataan Desa dan Program Penunjang Dinas PMDT dengan total pagu anggaran Rp.16.197.127.511,77.

Selain Rencana Pendanaan Diatas, terdapat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Dinas PMDT Provinsi Lampung yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 15.Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PRIORITAS	KET
1	2	3	4	5
Α	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Peningkatan Kualitas Pembangunan kawasan transmigrasi	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
1			Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Wajib Nasional
2			Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Prioritas Gubernur
3			Pelatihan transmigrasi	Prioritas Rakortekbang Kemendagri
4			Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	Prioritas Rakortekbang Kemendagri
B.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
5			Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Wajib Nasional
6			Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Wajib Nasional
7			Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Prioritas Gubernur
C.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Terlaksananya peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	

8			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga AdatDesa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Gizi dan stunting Nasional
9			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Wajib Nasional
10			Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Wajib Nasional
11			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Wajib Nasional
12			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Prioritas Gubernur
D.	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	
13			Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Prioritas Gubernur

Sebagai bagian dari strategi akseleratif dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, diperlukan identifikasi sub kegiatan yang memiliki dampak langsung dan signifikan terhadap prioritas pembangunan. Tidak seluruh sub kegiatan memiliki bobot kontribusi yang sama terhadap pencapaian target pembangunan, sehingga pemilahan terhadap sub kegiatan prioritas menjadi langkah penting dalam memastikan efektivitas intervensi perencanaan.

Sub kegiatan prioritas ini disusun berdasarkan sejumlah kriteria, antara lain keselarasan dengan program prioritas daerah, urgensi pencapaian sasaran RPJMD, potensi menghasilkan output yang strategis, serta dukungan terhadap agenda reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang adaptif. Pemilahan ini juga mempertimbangkan kapasitas pelaksanaan, ketersediaan sumber daya, dan keberlanjutan dampak pembangunan.

4.2 Dukungan Sub Kegiatan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi pada RPJMN 2025-2029

Penyelarasan Renstra PD Tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung Asta Cita, dengan mempertimbangkan kondisi, karakteristik, dan otonomi daerah, antara lain:

- a. Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) yang terdapat dalam RPJMN Tahun 2025-2029:
- b. Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional yang telah ditentukan lokasinya di dalam RPJMN Tahun 2025-2029;

Sebagai langkah konkret mencapai sasaran jangka menengah terutama untuk pencapaian sasaran penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang berkelanjutan, di dalam RPJMN Tahun 2025- 2029 diidentifikasi beberapa Kegiatan Prioritas Utama. Kegiatan Prioritas Utama merupakan kebijakan terintegrasi yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Kegiatan Prioritas Utama ini menjadi fokus penekanan pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029. Kegiatan Prioritas Utama juga disusun dengan memperhatikan kontribusi dari berbagai pihak baik Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta dan staftehotders lainnya.

Sebagai dukungan pelaksanaan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) maka Provinsi Lampung melakukan keselarasan dengan program perangkat daerah pada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 16.
Subkegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) yang terdapat dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Prioritas	KegiatanPrioritas	Dukungan PD y	ang merupakan Kew	enangan Provinsi
Nasional (PN)	Utama (KPU) Pada RPJMN	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Output Kegiatan
1	2	3	4	5
PN 6	Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa	PROGRAM PENATAAN DESA	Fasilitasi Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa

Intervensi Perangkat Daerah Pada Arah Pembangunan Wilayah Provinsi Lampung Dalam Rancangan Akhir RPJMN 2025-2029

Pendekatan pembangunan berbasis kewilayahan dalam Renstra juga sejalan dengan prinsip RPJMD yaitu penguatan konektivitas antar pusat pertumbuhan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur dasar, pengembangan kawasan ekonomi khusus, serta percepatan pembangunan wilayah tertinggal dan perbatasan. Penataan ruang, pengembangan kawasan strategis provinsi, serta integrasi pembangunan perkotaan dan perdesaan menjadi elemen utama dalam mewujudkan struktur wilayah yang produktif, inklusif, dan resilien.

Dengan demikian, Renstra 2025–2029 tidak hanya menjadi instrumen perencanaan pembangunan daerah, tetapi juga bagian yang tidak terpisahkan dari orkestrasi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045, dengan menempatkan Lampung sebagai wilayah yang tangguh, berdaya saing, dan adaptif terhadap tantangan global dan dinamika domestik.

Berikut Tabel Keselarasan Strategi dan arah kebijakan dalam Rentra dengan arah pembangunan Kewilayahan RPJMD Tahun 2025-2029 :

Tabel 17. Intervensi Perangkat Daerah Pada Arah Pembangunan Wilayah Provinsi Lampung Dalam Rancangan Akhir RPJMN 2025-2029

Lo	kas	i Prioritas pada	Highlight Indikasi		Usulan/Identifik	asi
		RPJMN	Intervensi	Program	Kegiatan	Output Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
С		AWASAN SWASE AN ENERGI	MBADA PANGAN, AIR			
	1	Kawasan Swasembada Pangan dan Air yaitu Mesuji- Tulan gbawang (Kab. Mesuji, Kab. Tulang	k. Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara	(2 13 03) Program Peningkatan Kerja Sama Desa	(2 13 01 1.01) Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Pada Badan Usaha Milik Bersama (BUMDesma)
	Tulang Bawang, Kab. Tulang Bawang Barat, Kab.	lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi		Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Menjalin Kerjasama Dengan Mitra Dalam Membangun Koperasi Desa	
			dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani;			Melakukan Penguatan Kelembagaan Koperasi
			peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama			Melakukan Pembinaan Umum, Koordinasi Pelaksanaan Pemantauan Supervisi, Evaluasi dan Pelaporan Kerja Sama Pemerintahan
				(2 13 04)	(2 13 04 1.01)	Pelaksanaan Pembinaan dan
				Program Administrasi Pemerintaha n Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraa n Pemerintahan Desa	Pengawasan Penetapan Pengaturan BUMDes Kab/Kota dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa

			(2 13 05)	(2 13 05 1.01)	Pengembangan
			Program Pemberdaya a n Lembaga Kemasyarak at an, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata n Yang Bergerak Di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
2	Kawasan Swasembada Pangan dan Air yaitu Seputih- Seka mpung (Kab. Lampung Timur, Kab.	I. Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan	(2 13 03)Program Peningkatan Kerja Sama Desa	(2 13 01 1.01) Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Melaksanakan Program Unggulan Gubernur Desaku Maju
	Lampung Tengah, Kab. Lampung Selatan, Kab. Pesawaran, Kab.Pringsewu dan Kabupaten Tanggamus	penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama			

			T		
				(2 13 03 3.01)Fasilitasi	Melaksanakan Pembinaan dan
				Kerja Sama	Pengawasan
				Antar Desa	Pada Badan
				Yang Menjadi	Usaha Milik
				Kewenangan	Bersama
				Provinsi	(BUMDesma)
	ŀ			1 10 11101	Menjalin
					Kerjasama
					Dengan Mitra
					Dalam
					Membangun
					Koperasi Desa
					Melakukan
					Penguatan
					Kelembagaan
					Koperasi
					Melakukan
					Pembinaan
					Umum,
					Koordinasi
					Pelaksanaan
					Pemantauan
					Supervisi,
					Evaluasi dan
					Pelaporan Kerja
					Sama
-			(0.40.04)	(0.40.04.4.04)	Pemerintahan
			(2 13 04)	(2 13 04 1.01)	Pelaksanaan
			Program	Pembinaan dan	Pembinaan dan
			Administrasi	Pengawasan	Pengawasan
			Pemerintaha	Penyelenggaraa	Penetapan
			n Desa	n Pemerintahan	Pengaturan
				Desa	BUMDes
					Kab/Kota dan
					Lembaga Kerja
		 			sama antar Desa
			(2 13 05)	(2 13 05 1.01)	Pengembangan
			Program	Pemberdayaan	Usaha Ekonomi
			Pemberdaya	Lembaga	Masyarakat dan
			a n Lembaga	Kemasyarakata	Pemerintah Desa
			Kemasyarak	n Yang	Dalam
			,	Bergerak Di	Meningkatkan
			at an,		Pendapatan Asli
			Lembaga	Bidang	Desa
			Adat dan	Pemberdayaan	D030
			Masyarakat	Desa dan	
			Hukum Adat	Lembaga Adat	
				Tingkat Daerah	
				Provinsi serta	
				Pemberdayaan	
				Masyarakat	
				Hukum Adat yg	
				Masyarakat	
				Pelakunya	
				Hukum Ádat	
				Yang Sama	
				Berada di Lintas	
				Daerah	
				Kab/Kota	
1 1			l	ι αυ/πυια	1

1 Pesisir Barat a Lampung (Pemerataan Pembangunan) dasar (air baku, air minum, dan sanitasi, infrastruktur janngan transmisi, infrastruktur janngan layak huni), serta peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan ari, energi, dan p	D										
air, energi, dan pangan Program Pemberdayaan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Yang Bergerak Di Bidang Masyarakat Hukum Adat Yang Bergerak Di Bidang Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Hukum Adat Yang Bergerak Di Bidang Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Masyarakat Nang Masyarakat Nang Masyarakat Nang Masyarakat Nang Masyarakat Nang Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya H		1	Lampung (Pemerataan	infrastruktur layanan dasar (air baku, air minum, dan sanitasi, infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan listrik perdesaan, serta rumah layak huni), serta	05)Program Pemberdaya a n Lembaga Kemasyarak at an, Lembaga Adat dan Masyarakat	Melaksanakan Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat	Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat				
E KAWASAN KONSERVASI DAN RAWAN BENCANA Provinsi Lampung a. Pemberian makan bergizi di sekolah, madrasah, dan dayah/pesantren, serta pemberian makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita • (2 13 05) (2 13 05 1. 01) Program Pemberdayaa Lembaga Kemasyarakata n Yang Bergerak Di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Hukum Adat Provinsi serta Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Hukum Adat Yang Sama Berada di Lintas Daerah Bergerak Di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Sama Berada di Lintas Daerah					Pemberdaya a n Lembaga Kemasyarak at an, Lembaga Adat dan Masyarakat	Lembaga Kemasyarakata n Yang Bergerak Di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Berada di Lintas Daerah					
Lampung bergizi di sekolah, madrasah, dan dayah/pesantren, serta pemberian makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan baliita Program Pemberdaya a n Lembaga Kemasyarakat at an, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Berada di Lintas Daerah	Е	KA		RVASI DAN RAWAN BENC	CANA						
b. Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, antara lain melalui :			Lampung	bergizi di sekolah, madrasah, dan dayah/pesantren, serta pemberian makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita	Program Pemberdaya a n Lembaga Kemasyarak at an, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata n Yang Bergerak Di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Berada di Lintas Daerah	Makan Bergizi untuk Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Balita Melalui Lembaga Posyandu dan				

	Pencegahan dan Penurunan Stanting	(2 13 05) Program Permberdayaan Lembaga Kemasyarkatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum adat	(2 13 051.01) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak Di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Stunting Melaui Pemberian Vitamin dan Makanan pendamping melalui Posyandu Desa
--	---	--	---	--

Lokasi Prioritas Pada RPJMN (kolom 1) dan Highlight Indikasi Intervensi RPJMN (kolom 2) tercantum pada RPJMN 2025-2029 Lampiran IV, Wilayah Sumatera, Provinsi Lampung Proyek Strategis Nasional (PSN) disusun dan ditetapkan sebagai sebuah langkah konkret teknis yang utamanya mendukung dan memastikan pelaksanaan kegiatan Prioritas Utama (KPU). PSN dalam hal ini merupakan upaya strategis yang direncanakan untuk mencapai target pembangunan serta mendukung prioritas presiden hingga tahun 2029. Perencanaan dan penyusunan PSN dilakukan dengan prosedur dan kriteria yang jelas, akuntabel serta mendukung upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Proyek Strategis Nasional dapat diprakarsai/diusulkan dan dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara maupun badan usaha swasta. Proyek-proyek yang diusulkan dan dilaksanakan selain oleh Pemerintah Pusat merupakan bentuk kontribusi Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan badan usaha swasta pada pencapaian sasaran-sasaran RPJMN yang memerlukan dukungan dari Pemerintah. Pemetaan Program dan Kegiata/Sub Kegiatan pada dinas PMDT Subkegiatan pada PD yang mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai berikut:

Tabel 18.Subkegiatan yang mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Proyek Strategis Nasional (PSN)	Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Lampung	Strategi RPJMD Provinsi Lampung	Dukungan PD yang merupakan Kewenangan Provinsi				
	Lampung		Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Output Kegiatan		
Program Makan Bergizi Gratis	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	gizi masyarakat dan mendukung Program Makan Bergizi Gratis. Mendukung program nasional pemberian makanan bergizi gratis	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT/Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga AdatDesa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Ada Desa/Kelurahan dan MasyarakaHukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya		

4.3 Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah pada Program Unggulan Daerah dan Program Pendukung Tematik Pembangunan yang tercantum pada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029

Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah pada Program Unggulan Daerah, Visi dan Misi Gubernur akan dicapai melalui pelaksanaan 7 (tujuh) program unggulan yang merupakan program yang yang dikawal langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur. Untuk mewujudkan program unggulan tersebut maka didukung oleh program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah yang perlu dicantumkan pula pada renstra Dinas Pwmberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung. Program Unggulan tersebut adalah:

Tabel 19.

Tabel Dukungan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah pada Program Unggulan

	PROGRAM	DUKUN	NGAN PERANGKAT DAE	ERAH	KETERANGAN
NO	UNGGULAN DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6
1	Dukungan terhadap Makan Bergizi Gratis (MBG)	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	
2	Optimalisasi potensi ekonomi desa dengan peningkatan kapasitas bumdes dan koperasi	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	
3.	Lampung Menjadi Lumbung Pangan Nasional	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	

	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	

Sebagai upaya mewujudkan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional dan daerah, Pemerintah Provinsi Lampung telah mengintegrasikan program-program perangkat daerah yang secara langsung mendukung tematik pembangunan dalam RPJMN Tahun 2025–2029. Tematik pembangunan tersebut meliputi antara lain Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pengendalian Inflasi, Penurunan Stunting, Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Stabilitas Harga Pangan, dan Penyediaan Cadangan Pangan.

Setiap perangkat daerah telah merumuskan program prioritas yang selaras dengan arah kebijakan nasional, sehingga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas capaian pembangunan serta memperkuat kontribusi daerah dalam pencapaian target pembangunan nasional secara keseluruhan. Dukungan program ini juga menunjukkan komitmen Provinsi Lampung dalam mempercepat transformasi pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis hasil. Berikut disampaikan tabel keselarasan Tematik, program perangkat daerah dan perangkat daerah yang bertanggungjawab.

Tabel 20.

Dukungan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah pada Tematik
Pembangunan

NO	PROGRAM UNGGULAN		1	KETERANGAN	
	DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1.	Penurunan Stunting	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	
2	Penghapusan Kemiskinan Ekstrim	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	
		Program pembangunan kawasan transmigrasi	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Penyuluhan Transmigrasi	

Program Prioritas ini adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Dinas PMDT sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yaitu pada tujuan Mewujudkan Ekosistem Ekonomi Berbasis Desa sasaran Meningkatnya desa mandiri dan pada misi ke 1 (mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri dan inovatif)

4.4 INOVASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI UNTUK MENCAPAI VISI DAN MISI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

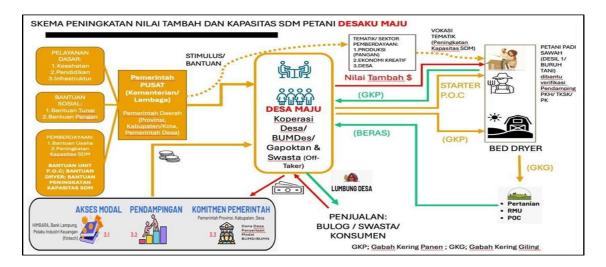
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam pasal 388 ayah (9) dan ayat (11) menyatakan bahwa Pemerintah Pusat memberikan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Sebagai bentuk penjabaran dan perundangan tersebut maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Indeks Inovasi Daerah merupakan pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat inovasi dan kemampuan suatu daerah dalam menciptakan, mengadopsi, dan menggunakan inovasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat. Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri yang diberikan mandat untuk melaksanakan Penilaian Inovasi Daerah.

Pemerintah daerah didorong untuk melahirkan ide gagasan berupa inisiatif-inisiatif baru inovasi dengan melaksanakan penilaian inovasi daerah melalui rangkaian pelaporan Indeks Inovasi Daerah (IID) dan Innovative Government Awards (IGA). IID dan IGA yang dilaksanakan setiap tahun, dimana Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) wajib untuk berpartisipasi. Kedua kegiatan tersebut merupakan tahapan wajib penilaian Kementerian Dalam Negeri terhadap kinerja daerah dalam melaksanakan inovasi, dimana IID adalah tahapan penjaringan dan penilaian inovasi yang telah dilakukan daerah, sedangkan IGA adalah tahapan pemaparan inovasi unggulan oleh Kepala Daerah dan pengapresian atas daerah yang berhasil menerapkan inovasi dalam pelaksanaan birokrasi.

Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi melaksanakan Program Desaku Maju memiliki skema Peningkatan Nilai Tambah dan kapasitas SDM Petani melalui kemudahan mendapatkan modal bagi petani, pendampingan usaha tani, dan dukungan komitmen pemerintah (dana desa dan BUMD) yang dapat diakses melalui Koperasi Desa, BUMDes, Gapoktan maupun Sektor Swasta guna peningkatan hasil produksi petani dalam perkuatan lumbung pangan desa maupun nasional.

Gambar 3.

Skema Program Desaku Maju Pada Dinas PMDT Provinsi Lampung



Tabel berikut menyajikan daftar daftar Inovasi DPMDT Provinsi Lampung yang secara langsung mendukung program pembangunan daerah, dalam pelaksanaan Renstra pada periode 2025–2030.

Tabel 21. Inovasi DPMDT Provinsi Lampung

VISI DAN MISI YANG BERKAITAN DENGAN PD	SASARAN YANG BERKAITAN DENGAN PD	NSPK PD	USULAN INOVASI	оитрит	оитсоме	KETERANGAN
2	3	4	5	6	7	8
		02.02.05 Lampung Pusat Teknologi Terpadu	Desa Inklusif dan Gotong Royong	terbentuknya Lembaga Gotong Royong Desa	Solidaritas Sosial Meningkat	
		02.02.05 Lampung Pusat Teknologi Terpadu	Kemitraan Sosial Kerja sama dengan lembaga keagamaan, LSM, CSR perusahaan untuk mendukung kegiatan gotong royong.	terlaksananya Kemitraan Sosial Kerja sama dengan lembaga keagamaan, LSM, CSR perusahaan untuk mendukung kegiatan gotong royong.	Kontribusi IDM Indeks sosial meningkat (partisipasi, kerukunan, kohesi sosial), Indeks lingkungan meningkat (lingkungan bersih, sehat, berkelanjutan).	
		02.02.05 Lampung Pusat Teknologi Terpadu 02.02.02 Pengusaha	Dana Sosial Desa Alokasi Dana Desa untuk bantuan sosial bagi warga miskin, rentan, dan terdampak Desaku Maju	Terpenuhinya Dana Sosial Desa Alokasi Dana Desa untuk bantuan sosial bagi warga miskin, rentan, dan terdampak bencana. Terselenggaranya Sistem Data Desa Terintegrasi	Desa mampu merespons masalah sosial, bencana, atau krisis dengan cepat berbasis gotong royong. Transformasi Digital Desa	
		Muda Berdaya Saing dan Inovatif		Terselenggranya Desa memiliki dashboard data untuk profil desa (ekonomi, sosial, infrastruktur, potensi). Terselenggranya Sistem informasi desa terhubung dengan kabupaten/provinsi.	Perencanaan desa berbasis data valid. Transparansi dan akuntabilitas meningkat.	
				Terselenggranya Data digunakan untuk perencanaan pembangunan berbasis evidence.		
		02.02.02 Pengusaha Muda Berdaya	Roadmap Ekonomi Lokal	Terselenggaranya Roadmap Ekonomi Lokal	Percepatan Penurunan Kemiskinan Rural	
		Saing dan Inovatif	Analisis potensi unggulan desa (pertanian, UMKM, wisata, perikanan).	Terselenggranya Analisis potensi unggulan desa (pertanian, UMKM, wisata, perikanan).	Akses pekerjaan dan usaha baru terbuka. Rumah tangga miskin mendapat prioritas	
			Penyusunan dokumen rencana aksi pengembangan ekonomi lokal.	Penyusunan dokumen rencana aksi pengembangan ekonomi lokal.	akses program ekonomi.	
			Integrasi roadmap	Integrasi roadmap dengan		
		02.02.02 Pengusaha Muda Berdaya Saing dan Inovatif	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa BUMDes diperkuat melalui pelatihan manajemen, akuntansi, dan digitalisasi.	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa BUMDes diperkuat melalui pelatihan manajemen, akuntansi, dan digitalisasi. Revitalisasi koperasi desa	Penguatan Kelembagaan Desa Desa berfungsi sebagai pusat pertumbuhan lokal. Lembaga ekonomi desa	
			Revitalisasi koperasi desa berbasis komoditas unggulan.	berbasis komoditas unggulan. Sinergi antar-BUMDes	(BUMDes, koperasi) menjadi motor penggerak pembangunan.	
			Sinergi antar-BUMDes melalui	melalui konsorsium/kemitraan antar desa.		
		02.02.02 Pengusaha Muda Berdaya Saing dan Inovatif	Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga	Terlaksananya Pelatihan keterampilan usaha: pengolahan pangan lokal, kerajinan, digital marketing, packaging, manajemen keuangan rumah tangga.	Kemandirian Ekonomi Keluarga Berkurangnya ketergantungan keluarga pada bantuan sosial.	
		02.02.02 Pengusaha Muda Berdaya Saing dan	Pelatihan Keterampilan dan Manajemen Usaha	Terlaksananya Pelatihan Keterampilan dan Manajemen Usaha	Ekonomi Desa Tumbuh Produk desa dikenal lebih luas, PADes	
		Inovatif	Pelatihan pengolahan pangan lokal, kerajinan, digital marketing, manajemen keuangan rumah	Terselenggaranya Pelatihan pengolahan pangan lokal, kerajinan, digital marketing, manajemen keuangan	meningkat dari kontribusi unit usaha.	
		02.02.02 Pengusaha Muda Berdaya Saing dan Inovatif		Terselemngggranya Koperasi/Unit Simpan Pinjam Desa Lembaga ekonomi desa yang menyalurkan modal usaha dan menampung hasil produksi.	Kontribusi terhadap IDM Indeks Ekonomi meningkat (pendapatan, usaha, pasar). Indeks Sosial meningkat (peran perempuan, pemuda, kohesi sosial).	

	SASARAN					
VISI DAN MISI YANG BERKAITAN DENGAN PD	YANG BERKAITAN DENGAN PD	NSPKPD	USULAN INOVASI	ОИТРИТ	OUTCOME	KETERANGAN
2	3	4	5	6	7	8
Visi : Bersama	02.02.05	02.02.05	Desa Inklusif dan	Pembentukan Lembaga	Solidaritas Sosial	
Lampung Maju	Lampung	Lampung Pusat	Gotong Royong	Gotong Royong Desa	Meningkat	
menuju Indonesia	Pusat	Teknologi				
Emas	Teknologi Terpadu	Terpadu				
Misi 1: Mendorong		02.02.05	Kemitraan Sosial Kerja	Terselenggranya	Kontribusi IDM Indeks	
Pertumbuhan		Lampung Pusat	sama dengan lembaga	Kemitraan Sosial Kerja	sosial meningkat	
Ekonomi yang		Teknologi	keagamaan, LSM, CSR	sama dengan lembaga	(partisipasi, kerukunan,	
Inklusif, Mandiri,		Terpadu	perusahaan untuk	keagamaan, LSM, CSR	kohesi sosial), Indeks	
dan Inovatif			mendukung kegiatan	perusahaan untuk	lingkungan meningkat	
			gotong royong.	mendukung kegiatan	(lingkungan bersih,	
				gotong royong.	sehat, berkelanjutan).	
		02.02.05	Dana Sosial Desa	Tersedianya Dana Sosial	Desa mampu merespons	
		Lampung Pusat	Alokasi Dana Desa	Desa Alokasi Dana Desa	masalah sosial,	
		Teknologi	untuk bantuan sosial	untuk bantuan sosial bagi	bencana, atau krisis	
		Terpadu	bagi warga miskin,	warga miskin, rentan, dan	dengan cepat berbasis	
			rentan, dan terdampak bencana.	terdampak bencana.	gotong royong.	
		02.02.02 Populsaha	Desaku Maju	Terselenggranya Sistem	Transformasi Digital Desa	
		Pengusaha Muda Berdaya		Data Desa Terintegrasi	Perencanaan desa	
		Saing dan		Desa memiliki dashboard	berbasis data valid.	
		Inovatif		data untuk profil desa	Derbasis data valid.	
		liiovatii		(ekonomi, sosial,	Transparansi dan	
				infrastruktur, potensi).	akuntabilitas meningkat.	
				Sistem informasi desa		
				terhubung dengan		
				kabupaten/provinsi.		
				Data digunakan untuk		
				perencanaan		
				pembangunan berbasis		
				evidence.		
		02.02.02 Pengusaha	Roadmap Ekonomi Lokal	Tersedianya Roadmap Ekonomi Lokal	Percepatan Penurunan Kemiskinan Rural	
		Muda Berdaya				
		Saing dan	Analisis potensi	Terwujudnya Analisis	Akses pekerjaan dan	
		Inovatif	unggulan desa	potensi unggulan desa	usaha baru terbuka.	
			(pertanian, UMKM,	(pertanian, UMKM, wisata,		
			wisata, perikanan).	perikanan).	Rumah tangga miskin	
			Penyusunan dokumen	Tersusunnya dokumen	mendapat prioritas akses program ekonomi.	
			rencana aksi	rencana aksi		
			pengembangan ekonomi lokal.	pengembangan ekonomi lokal.		
			Integrasi roadmap dengan RPJMDes dan	terintegrasi roadmap dengan RPJMDes dan		
			Renstra BUMDes.	Renstra BUMDes.		
		02.02.02	Penguatan	Terselenggranya	Penguatan Kelembagaan	
		Pengusaha	Kelembagaan Ekonomi	Penguatan Kelembagaan	Desa	
		Muda Berdaya	Desa BUMDes	Ekonomi Desa BUMDes		
		Saing dan	diperkuat melalui	diperkuat melalui	Desa berfungsi sebagai	
		Inovatif	pelatihan manajemen,	pelatihan manajemen,	pusat pertumbuhan lokal.	
			akuntansi, dan	akuntansi, dan digitalisasi.		
			digitalisasi.		Lembaga ekonomi desa	
			Doubtelia: !	Revitalisasi koperasi desa	(BUMDes, koperasi)	
			Revitalisasi koperasi	berbasis komoditas	menjadi motor	
			desa berbasis	unggulan.	penggerak	
			komoditas unggulan.	Sinergi antar-BUMDes	pembangunan.	
			Sinergi antar-BUMDes	melalui		
			melalui	konsorsium/kemitraan		
			konsorsium/kemitraan	antar desa.		
			antar desa.			
		1		1	1	

VISI DAN MISI YANG BERKAITAN DENGAN PD	SASARAN YANG BERKAITAN DENGAN PD	NSPKPD	USULAN INOVASI	ОИТРИТ	OUTCOME	KETERANGAN
2	3	4	5	6	7	8
Visi : Bersama Lampung Maju menuju Indonesia Emas	02.02.05 Lampung Pusat Teknologi Terpadu	02.02.05 Lampung Pusat Teknologi Terpadu	Desa Inklusif dan Gotong Royong	Pembentukan Lembaga Gotong Royong Desa	Solidaritas Sosial Meningkat	
Misi 1: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif		02.02.05 Lampung Pusat Teknologi Terpadu	Kemitraan Sosial Kerja sama dengan lembaga keagamaan, LSM, CSR perusahaan untuk mendukung kegiatan gotong royong.	Terselenggranya Kemitraan Sosial Kerja sama dengan lembaga keagamaan, LSM, CSR perusahaan untuk mendukung kegiatan gotong royong.	Kontribusi IDM Indeks sosial meningkat (partisipasi, kerukunan, kohesi sosial), Indeks lingkungan meningkat (lingkungan bersih, sehat, berkelanjutan).	
		02.02.05 Lampung Pusat Teknologi Terpadu	Dana Sosial Desa Alokasi Dana Desa untuk bantuan sosial bagi warga miskin, rentan, dan terdampak bencana.	Tersedianya Dana Sosial Desa Alokasi Dana Desa untuk bantuan sosial bagi warga miskin, rentan, dan terdampak bencana.	Desa mampu merespons masalah sosial, bencana, atau krisis dengan cepat berbasis gotong royong.	
		02.02.02 Pengusaha Muda Berdaya Saing dan Inovatif	Desaku Maju	Terselenggranya Sistem Data Desa Terintegrasi Desa memiliki dashboard data untuk profil desa (ekonomi, sosial, infrastruktur, potensi). Sistem informasi desa terhubung dengan kabupaten/provinsi. Data digunakan untuk perencanaan pembangunan berbasis evidence.	Transformasi Digital Desa Perencanaan desa berbasis data valid. Transparansi dan akuntabilitas meningkat.	
		02.02.02 Pengusaha Muda Berdaya Saing dan Inovatif	Roadmap Ekonomi Lokal Analisis potensi unggulan desa (pertanian, UMKM, wisata, perikanan). Penyusunan dokumen rencana aksi pengembangan ekonomi lokal. Integrasi roadmap dengan RPJMDes dan Renstra BUMDes.	Tersedianya Roadmap Ekonomi Lokal Terwujudnya Analisis potensi unggulan desa (pertanian, UMKM, wisata, perikanan). Tersusunnya dokumen rencana aksi pengembangan ekonomi lokal. terintegrasi roadmap dengan RPJMDes dan Renstra BUMDes.	Percepatan Penurunan Kemiskinan Rural Akses pekerjaan dan usaha baru terbuka. Rumah tangga miskin mendapat prioritas akses program ekonomi.	
		02.02.02 Pengusaha Muda Berdaya Saing dan Inovatif	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa BUMDes diperkuat melalui pelatihan manajemen, akuntansi, dan digitalisasi. Revitalisasi koperasi desa berbasis komoditas unggulan. Sinergi antar-BUMDes melalui konsorsium/kemitraan antar desa.	Terselenggranya Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa BUMDes diperkuat melalui pelatihan manajemen, akuntansi, dan digitalisasi. Revitalisasi koperasi desa berbasis komoditas unggulan. Sinergi antar-BUMDes melalui konsorsium/kemitraan antar desa.	Penguatan Kelembagaan Desa Desa berfungsi sebagai pusat pertumbuhan lokal. Lembaga ekonomi desa (BUMDes, koperasi) menjadi motor penggerak pembangunan.	

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan Renstra secara objektif, terukur, dan akuntabel, diperlukan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang secara langsung merepresentasikan capaian kinerja strategis DPMDT Provinsi Lampung. IKU berfungsi sebagai alat ukur utama yang merefleksikan kontribusi perangkat daerah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD.

Penyusunan IKU dilakukan secara cermat dengan memperhatikan prinsip *SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)*, serta mengedepankan keselarasan vertikal maupun horizontal antara perencanaan daerah dan nasional. Selain itu, IKU juga dirancang untuk dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), serta sebagai komponen penting dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).

Setiap indikator yang dirumuskan telah melalui proses identifikasi yang mempertimbangkan keterukuran data, keterkaitan langsung dengan fungsi dan mandat kelembagaan DPMDT, serta konsistensi dengan indikator kinerja dalam RPJMD dan Rencana Aksi Kinerja Instansi Pemerintah. Selain sebagai alat monitoring internal, IKU juga berperan penting dalam mendukung sistem evaluasi kinerja daerah, pengambilan keputusan berbasis data, serta dalam menyusun laporan kinerja tahunan yang komprehensif. Lebih dari itu, keberadaan IKU diharapkan mampu mendorong transformasi kelembagaan ke arah yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil. Melalui pemantauan capaian indikator secara berkala, DPMDT dapat mengidentifikasi gap antara perencanaan dan realisasi, serta merumuskan langkah korektif secara tepat waktu dan berbasis bukti (evidence-based policy).

Tabel berikut menyajikan daftar Indikator Kinerja Utama DPMDT Provinsi Lampung untuk periode 2025–2030, yang menjadi acuan dalam pengukuran pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah selama periode Renstra.

Tabel 22. Indikator Kinerja Utama DPMDT Provinsi Lampung

INDIKATOR	Satuan	Baseline			TARGET	TAHUN			KET
SASARAN		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Sasaran Strate	gi Utama (IKU)							<u> </u>
Persentase Desa Mandiri	Persentase	14,68 % (data IDM)	21.42%	23.96%	24.37%	24.98%	25.22%	25.45%	Rencana target 40 desa mandiri pertahun
Persentase BUMDes Maju	Persentase	1,64	2.26%	2.88%	3.5%	4.12%	4.74%	5.36%	Rencana Target Peringkat 15 BUMDES Maju /tahun
Sasaran Strategi	Sasaran Strategi Penunjang								
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,97	75	76	78	80,50	81	81,52	

Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMDT Provinsi Lampung disusun untuk merepresentasikan capaian strategis perangkat daerah dalam menjalankan mandat perencanaan pembangunan daerah. IKU ini menjadi alat ukur utama dalam menilai efektivitas pelaksanaan program, kualitas tata kelola perencanaan, serta kontribusi DPMDT terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan.

Tabel 23.

Tabel Indikator Kinerja Utama dan Dinifisi Operasional DPMDT Provinsi Lampung

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan desa mandiri	Persentase desa mandiri	Makna Indikator: ID menjadi alat ukur dalam menentukan status desa secara nasional, dan merupakan alat pengukuran resmi yang diakui secara nasional. Pengukuran tersebut dilaksanakan oleh Kementrian Desa PDTT RI sebagai instansi pembina setiap tahunnya. Alasan Pemilihan: Sebagai upaya meningkatkan desa di Provinsi Lampung, dibutuhkan meningkatkan status desa mandiri. Rumus Perhitungan: (Σdesa mandiri yang menjadi target /Σtotal desa di Provinsi Lampung) x 100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
2	Meningkatkan BUMDes Maju	Persentase BUMDes Maju	Rumus Perhitungan: (Σbumdes Maju/Σtotal bumdes di Provinsi Lampung) x 100 Alasan Pemilihan: Sebagai upaya peningkatkan Bumdes Maju BUMDes di Provinsi Lampung, dibutuhkan upaya penguatan kelembagaan melalui pemeringkatan BUMDes di Provinsi Lampung.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung

Program Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Dinas PMDT, yaitu pijakan dalam penyusunan Renja Dinas PMDT Tahun 2030. Penyusunan program ini tidak hanya berorientasi pada target jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk memastikan adanya keterpaduan, konsistensi, dan keberlanjutan antar dokumen perencanaan, baik dari tingkat pusat maupun daerah. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur serta tujuan strategis Dinas PMDT secara lebih terarah. Selain itu, Program Tahun 2030 juga berfungsi sebagai instrumen pengendali dan pedoman evaluasi kinerja agar proses pembangunan masyarakat dan desa dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan.

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran strategis yang mencerminkan kinerja prioritas pembangunan daerah secara langsung dan berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat. IKK dipilih secara selektif dari berbagai urusan pemerintahan, baik wajib maupun pilihan, yang dinilai mampu menjadi pengungkit utama pencapaian tujuan dan sasaran Renstra.

Penetapan IKK dalam Rencana Strategis pada Dinas PMDT Provinsi Lampung 2025–2029 mengacu pada prinsip akuntabilitas berbasis hasil (*result-based management*), dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan dasar, pengurangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, kualitas lingkungan, serta penguatan reformasi birokrasi. IKK juga disusun dengan mempertimbangkan sinergi lintas sektor, arah kebijakan RPJMD, serta indikator pembangunan nasional.

Melalui penetapan target IKK yang terukur dan terarah, diharapkan kinerja pemerintah daerah dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan dan berdampak nyata bagi kehidupan masyarakat Lampung, serta mendorong percepatan terwujudnya visi pembangunan daerah menuju Lampung Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan.

Selain uraian Indikator Kinerja Utama tersebut, target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Dinas PMDT, dirumuskan memiliki 2 Indikator Kinerja Kunci yang diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 24.

Indikator Kinerja Kunci Dinas PMDT Provinsi Lampung

NO	INDIVATION (CATELIAN		TARGET				IZE/D	
NO	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Presentase Dukungan Kegiatan Pemerintah Daerah yang dialokasikan di 4 Kawasan Transmigrasi	persen	100	100	100	100	100	100	100

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung tahun 2025-2029 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 Provinsi Lampung, sehingga tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung akan menunjang capaian RPJMD tahun 2025-2029 Provinsi Lampung.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung 2025-2029, telah memiliki tujuan dan sasaran yang jelas, terukur dan tentunya dapat dilaksanakan dan dicapai. Namun demikian dalam pelaksanaanya akan tetap dilakukan monitoring dan evaluasi untuk memantau keberhasilan pelaksanaan perencanaan yang menjadi kewenangan Dinas, dan akan melakukan penyesuaian jika dianggap perlu.

Adapun manfaat Renstra bagi Dinas PMDT yaitu: 1) menjadi acuan setiap bidang dalam melaksanakan program dan kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsinya; 2) untuk pengelolaan keberhasilan, dimana perencanaan strategik akan menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif; 3) untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, karena pola-pola pelayanan yang perlu diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat; dan 4) untuk meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar unit kerja sehingga mendorong proses pengambilan keputusan dalam pencapaian tujuan organisasi.

LAMPIRAN 1. CSF DINAS PMDT

ТАНАР	Menentukan outcome/ kinerja yang akan dijabarkan dalam perjenjangan kinerja	Outcome/kinerja berdasarkan Isu Strategis (ISI ISU STRATEGIS RENSTRA OPD)	Outcome/ Hasil Strategis (ISI DENGAN TUJUAN) DIAMBIL DARI SASARAN RENSTRA OPD ATAU TUJUAN DI INMEN
ī	Dalam menentukan outcome/ hasil kinerja dapat ditentukan melalui : 1) mandat atas tugas dan fungsi; 2) Isu strategis/permasalahan yang dihadapi dan yang akan dihadapi; 3) Ekspektasi/harapan masyarakat dan/atau stakeholder	1. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Dan Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa serta Penguatan Partistipasi sosial dan optimalisasi Teknologi Tepat Guna 2. Penguatan dan Pengembangan Perekonomian Desa	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa

	Identifikasi Critical Success Factor (CSF) yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja/ outcome strategis	CSF berdasarkan permasalahan yang terjadi (ISI DENGAN PERMASALAHAN RENSTRA OPD)	Isu Strategis (SANDINGKAN DENGAN ISU STRATEGIS YANG BERSINGGUNGAN)
TAHAP II	Dalam menentukan CSF dapat dilakukan beberapa cara, diantaranya 1. Tetapkan CSF yang menggambarkan isu/permasalahan yang benar-benar terjadi (factual problem); 2. Tetapkan CSF yang juga menggambarkan kebutuhan mencapai outcome/kinerja di masa yang akan datang (antisipatif); 3. Tetapkan CSF dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan 4. Identifikasi CSF harus dilakukan secara holistic, tidak tersekat 5. Pastikan CSF merupakan "sebab" atau "cara" dan kinerja/outcome adalah "akibat" atau "hasil" nya	Rendahnya kapasitas aparatur desa Dan Belum optimalnya pemanfaatan Dana Desa serta Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna yang kurang optimal	Kurangnya pelatihan bagi aparatur desa Minimnya pemahaman tata kelola pemerintahan desa yang balk Prioritas penggunaan dana desa belum diarahkan pada pembangunan strategis berkelanjutan Lemahnya perencanaan dan pelaporan kegiatan Lemahaya perencanaan desa belum berfungsi optimal Musyawarah desa kurang dimanfaafkan secara optimal untuk mengakomodir usulan kelompok masyarakat *Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna kurang optimal

ISU STRATEGIS Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Dan Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa serta Penguatan Partisipasi sosial dan optimalisasi Teknologi Tepat Guna	Kondisi yang diperlukan (CSF) (ISI DENGAN KONDISI YG INGIN DICAPAI DENGAN MELIHAT KONDISI PERMASALAHAN) DIAMBIL DARI CSF
Neurangnya pelatihan bagi aparatur desa Minimnya pemahaman tata kelola pemerintahan desa yang balk Prioritas penggunaan dana desa belum diarahkan pada pembangunan strategis berkelanjutan Lemahnya perencanaan dan pelaporan kegiatan Lembaga kemasyarakatan desa belum berfungsi optimal Musyawarah desa kurang dimanfaatkan secara optimal untuk mengakomodir usulan kelompok masyarakat Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna kurang optimal Lemahnya kelembagaan dan Pengelolaan BUMDes	Melaksanakan Peningkatan kapasitas aparatur dan Lembaga kemasyarakatan desa melalui pelatihan, pembinaan dan monitoring evaluasi, dan optimalisasi penggunaan aplikasi digital dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat serta Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di desa. • Banyak BUMDes belum aktif, belum berbadan hukum dan belum memiliki unit usaha produktif

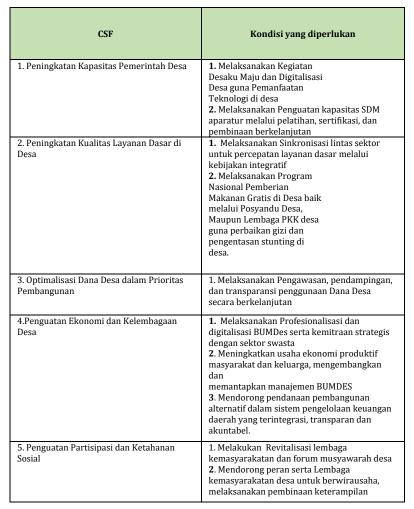
Langkah Selanjutnya

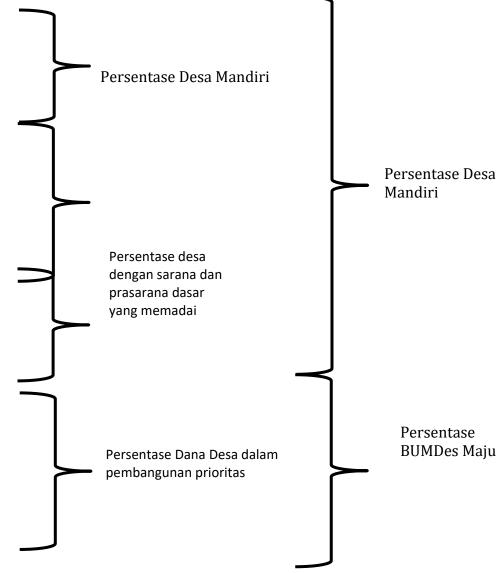
ISU STRATEGIS Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Dan Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa serta Penguatan Partisipasi sosial dan optimalisasi Teknologi Tepat Guna	Kondisi yang diperlukan (CSF) (ISI DENGAN KONDISI YG INGIN DICAPAI DENGAN MELIHAT KONDISI PERMASALAHAN) DIAMBIL DARI CSF
Kurangnya pelatihan bagi aparatur desa Minimnya pemahaman tata kelola pemerintahan desa yang baik Prioritas penggunaan dana desa belum diarahkan pada pembangunan strategis berkelanjutan Lemahnya perencanaan dan pelaporan kegiatan Lemahnya perencanaan desa belum berfungsi optimal Musyawarah desa kurang dimanfaatkan secara optimal untuk mengakomodir usulan kelompok masyarakat *Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatkan *Texhologi Tepat Guna kurang optimal	Melaksanakan Peningkatan kapasitas aparatur dan Lembaga kemasyarakatan desa melalui pelatihan, pembinaan dan monitoring evaluasi, dan optimalisasi penggunaan apikasi digital dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat serta Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di desa.

ISU STRATEGIS Penguatan dan Pengembangan Perekonomian Desa	Kondisi yang diperlukan (CSF) (ISI DENGAN KONDISI YG INGIN DICAPAI DENGAN MELIHAT KONDISI PERMASALAHAN) DIAMBIL DARI CSF
Banyak BUMDes belum aktif, belum berbadan hukum dan belum memiliki unit usaha produktif	Melaksanakan pembinaan BUMDes secara Profesional, digitalisasi dan kemitraan strategis dengan sektor swasta serta Mendukung Program Nasional Pemberian Makanan Gratis untuk perbaikan gizi dan pengentasan stunting.

Kondisi yang diperlukan (CSF) ISI DENGAN CSF	Sasaran RENSTRA ISI DENGAN RENSTRA OPD
Melaksanakan Peningkatan kapasitas aparatur dan Lembaga kemasyarakatan desa melalui pelatihan, pembinaan dan monitoring evaluasi, dan optimalisasi penggunaan aplikasi digital dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat serta Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di desa.	1.Peningkatan status Desa Mandiri
Melaksanakan pembinaan BUMDes secara Profesional, digitalisai dan kemitraan strategis dengan sektor swasta serta Mendukung Program Nasional Pemberian Makanan Gratis untuk perbaikan gizi dan pengentasan stunting.	2.Peningkatan status BUMDes Maju

(CSF)	CSF (DAPAT DIAMBIL SASARAN PROGRAM PADA INMENDAGRI 2/2025)
Melaksanakan Peningkatan kapasitas aparatur dan Lembaga kemasyarakatan desa melalui pelatihan, pembinaan dan monitoring evaluasi, dan optimalisasi penggunaan aplikasi digital dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat serta Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di desa.	Meningkatnya kualitas penataan desa dan Meningkatnya efektifitas kerjasama desa serta Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan Meningkatnya kapasitas lembaga masyarakat,lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan
Melaksanakan pembinaan BUMDes secara Profesional, digitalisasi dan kemitraan strategis dengan sektor swasta serta Mendukung Program Nasional Pemberian Makanan Gratis untuk perbaikan gizi dan pengentasan stunting.	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintah desa serta Meningkatnya kapasitas lembaga masyarakat,lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan





LAMPIRAN 2. POHON KINERJA DINAS PMDT

